

STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA

2018



STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA 2018

ISBN	: 2656-2243
Katalog	: 2104012.12
No Publikasi	: 12520.1906
Ukuran Buku	: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: xii + 81 hal
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Penyunting Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Diterbitkan oleh	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Dicetak oleh	: CV. Rilis Grafika

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

**TIM PENYUSUN
STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA 2018**

Penanggungjawab:

DR. SYECH SUHAIMI

Pengarah:

MUKHAMAD MUKHANIF, S.Si, M.Si

Editor:

ABDUL HAKIM PARAPAT, SST, M.Si

Penulis dan Pengolah Data:

SRI HASTUTI, SST, M.Si

Kover:

BRIAN FIRDIAN, SST

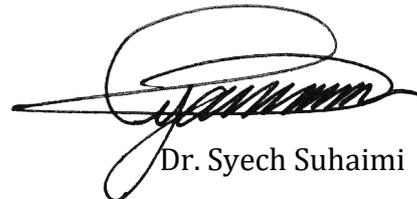
Kata Pengantar

Publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2018 menyajikan data mengenai perempuan dalam kaitannya dengan komposisi penduduk, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, status sosial ekonomi rumah tangga, keikutsertaan dalam pemerintahan dan politik.

Sumber data utama yang digunakan sebagian besar dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan juga survei-survei lain yang terkait. Harapan kami publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna data, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun kalangan akademisi. Kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terbitnya publikasi ini kami sampaikan banyak terima kasih.

Medan, September 2019
BPS Provinsi Sumatera Utara
Kepala,



Dr. Syech Suhaimi

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sumber Data	6
1.4 Sistematika Penyajian	6
BAB 2 KEPENDUDUKAN	9
2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk	9
2.2 Struktur Umur Penduduk	12
2.3 Status Perkawinan	14
BAB 3 PENDIDIKAN	19
3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	20
3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	22
3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	23
3.4 Angka Melek Huruf	24
3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	25
BAB 4 KESEHATAN	29
4.1 Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)	30
4.2 Fasilitas Tempat Melahirkan	30
4.3 Penolong Persalinan	33
4.4 Lama Pemberian ASI	34
4.5 Pemberian Imunisasi	38
BAB 5 KETENAGAKERJAAN	45
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	45
5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	47
5.3 Sektor Lapangan Pekerjaan Utama	48
5.4 Pekerja Formal dan Informal	49
5.5 Jam Kerja	51
5.6 Setengah Pengangguran	52
5.7 Pengangguran Terdidik	53
BAB 6 FERTILITAS DAN KB	57
6.1 Umur Perkawinan Pertama	58
6.2 Partisipasi KB	60

BAB 7	PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK	65
	7.1 Politik dan Legislatif	66
	7.2 Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil	69
BAB 8	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	75
BAB 9	KESIMPULAN	81

<https://sumut.bps.go.id>

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018	10
Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2018	11
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2018	14
Tabel 2.4 Keadaan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	15
Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar Penduduk menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	20
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni Penduduk menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	22
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	23
Tabel 3.4 Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	25
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	26
Tabel 4.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2018	30
Tabel 4.2 Lama Pemberian Air Susu Ibu Pada Balita Tahun 2017	35
Tabel 4.3 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Wilayah dan Lamanya Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2017	36
Tabel 4.4 Persentase Balita yang Diberi Imunisasi Tahun 2017	40
Tabel 5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2018	47
Tabel 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2018	49

Tabel 5.3	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	51
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2018	51
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2018	52
Tabel 5.6	Persentase Pengangguran menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	53
Tabel 7.1	Banyaknya Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	67
Tabel 7.2	Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan Tahun 2018	69
Tabel 7.3	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	70
Tabel 7.4	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018	71
Tabel 8.1	Banyaknya Kasus Terhadap Perempuan Tahun 2014 – 2018	76

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1	Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2018 13
Gambar 4.1	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2018 31
Gambar 4.2	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Wilayah dan Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2018 32
Gambar 4.3	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Penolong Persalinan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2018 34
Gambar 4.4	Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Wilayah Tahun 2017 39
Gambar 5.1	Diagram Ketenagakerjaan 46
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 50
Gambar 6.1	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin menurut Wilayah Tahun 2018 59
Gambar 6.2	Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2018 60
Gambar 6.3	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat KB Tahun 2018 61
Gambar 6.4	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin menurut Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan Tahun 2018 62
Gambar 7.1	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 70
Gambar 7.2	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 72



PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia pada hakekatnya membangun manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik tanpa memandang laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, peran serta perempuan dalam keberhasilan pembangunan masih banyak dikesampingkan dan dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Banyak negara di dunia pada saat ini berorientasi ke arah kesetaraan gender dalam penyusunan program pembangunannya dengan maksud menghilangkan semua bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di segala bidang.

Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan jenis kelamin, padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kata lain gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih terlihat jelas yang ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti

teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Semua ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses, dan kontrol yang dimiliki serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender (*gender issues*). Hal ini antara lain belum banyak masuknya pertimbangan manfaat pembangunan secara adil antara perempuan dan laki-laki. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan gender (kesenjangan gender).

Sejak ditandatanganinya kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2000 oleh 189 negara, termasuk Indonesia, telah menjadi agenda bahwa salah satu hal yang menjadi keberhasilan pembangunan adalah terjadinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Program MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu, telah menghasilkan kesepakatan baru yang dinamakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda pembangunan global untuk periode 2016-2030. SDGs mengagendakan pada tujuan yang kelima untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.

Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, maka kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan serta partisipasi kerja harus mendapat perhatian. Kebutuhan dasar tersebut mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia. Strategi dalam mencapai kesetaraan gender telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender atau disingkat PUG. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Ada tiga istilah yang mengacu pada peran gender, yaitu: 1) Peran Produktif yaitu peran-peran yang jika dijalankan mendapatkan uang langsung atau upah-upah yang lain, 2) Peran Reproduksi yaitu peran-peran yang dijalankan yang tidak menghasilkan uang serta dilakukan di dalam rumah, antara lain: pengasuhan atau pemeliharaan anak, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, menjamin seluruh anggota keluarga sehat, menjamin seluruh anggota keluarga kecukupan makan. dan 3) Peran Sosial (Kemasyarakatan)

terdiri dari aktivitas yang dilakukan di tingkat masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan oleh perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, seperti pelayanan posyandu, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pekerjaan sosial masyarakat lainnya dan tidak dibayar.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini serta seberapa jauh posisi kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan diperlukan gambaran yang lebih rinci mengenai statistik yang berwawasan gender (statistik yang dirinci menurut jenis kelamin) dari sisi kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan maupun kesehatan. Gambaran ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang peningkatan peran perempuan. Serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2018 ini merupakan salah satu upaya dalam menyediakan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kesetaraan dan keadilan gender di Sumatera Utara.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2018 ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indikator gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah.
2. Meningkatkan ketersediaan data statistik dan indikator serta analisis gender.
3. Mensosialisasikan penggunaan data statistik dan indikator gender di kalangan para pembuat kebijakan.
4. Meningkatkan komitmen untuk menggunakan data statistik dan indikator gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di masing-masing wilayah.

Adapun tujuan khusus penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2018 ini adalah untuk:

1. Mengetahui kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan berbagai bidang lainnya.
2. Memperoleh gambaran tentang karakteristik demografi dan berbagai permasalahan gender yang terjadi di Sumatera Utara.

1.3 Sumber Data

Untuk penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2018 ini, digunakan sumber data utama yang berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Data pendukung juga disertakan yang berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018 dan Sumatera Utara Dalam Angka 2019.

1.4 Sistematika Penyajian

Ulasan Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2018 diawali bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penyajian. Bab 2 membahas tentang jumlah dan komposisi penduduk, struktur umur penduduk, dan status perkawinan. Bab 3 membahas mengenai pendidikan, yang dilanjutkan dengan bab 4 yang membahas tentang kesehatan. Bab 5 akan membahas tentang ketenagakerjaan, dan bab 6 akan membahas tentang fertilitas dan KB. Pada bab 7 dibahas mengenai perempuan di sektor publik, pada bab 8 dibahas mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan penutup disajikan pada bab 9.

PENDUDUK



Rasio Ketergantungan = 55,69
- Anak-anak = 48,78
- Lansia = 6,91

Jumlah penduduk laki-laki = 7.193.200



Jumlah penduduk Perempuan = 7.222.191

Rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 99,60 yang artinya terdapat 99 orang penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Angka rasio ketergantungan Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 55,69, artinya bahwa dari 100 penduduk umur produktif harus menanggung 55 penduduk umur tidak produktif baik itu anak-anak maupun lansia.

SECARA TOTAL, JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN LEBIH BANYAK DIBANDING JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI



BAB 2 KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek, penduduk merupakan sasaran pembangunan, sedangkan sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan.

Suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar berarti memiliki aset potensial yang berguna dalam mendukung percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar tersebut mengindikasikan jumlah angkatan kerja yang tersedia juga dalam jumlah yang besar apalagi jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun bila tidak diimbangi dengan kualitas yang tinggi pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas penduduk sangat penting dilakukan untuk dapat mendukung jalannya pembangunan sehingga potensi besar yang ada dalam kuantitas penduduk dapat memberikan manfaat yang maksimal.

2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Angka proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 14.415.391 jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 1,07 persen atau sebanyak 153.244 jiwa dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 14.262.147 jiwa. Tabel 2.1 menunjukkan komposisi penduduk Sumatera Utara tahun 2018 menurut jenis kelamin. Pada tabel tersebut terlihat jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.222.191 jiwa. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang sebanyak 7.193.200 jiwa. Perbedaan tersebut dapat lebih jelas tergambar dengan melihat indikator kependudukan yang disebut rasio jenis kelamin.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin
dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
Kabupaten					
1	Nias	69 573	73 267	142 840	94.96
2	Mandailing Natal	217 723	225 767	443 490	96.44
3	Tapanuli Selatan	139 280	141 003	280 283	98.78
4	Tapanuli Tengah	185 715	184 456	370 171	100.68
5	Tapanuli Utara	148 222	151 659	299 881	97.73
6	Toba Samosir	90 686	91 987	182 673	98.59
7	Labuhanbatu	245 802	240 678	486 480	102.13
8	Asahan	363 686	360 693	724 379	100.83
9	Simalungun	430 306	433 387	863 693	99.29
10	Dairi	141 478	141 725	283 203	99.83
11	Karo	203 311	206 364	409 675	98.52
12	Deli Serdang	1 084 679	1 070 946	2 155 625	101.28
13	Langkat	521 382	514 029	1 035 411	101.43
14	Nias Selatan	157 526	159 681	317 207	98.65
15	Humbang Hasundutan	93 612	94 868	188 480	98.68
16	Pakpak Bharat	24 290	23 829	48 119	101.93
17	Samosir	62 492	63 324	125 816	98.69
18	Serdang Bedagai	308 419	306 199	614 618	100.73
19	Batu Bara	207 877	205 115	412 992	101.35
20	Padang Lawas Utara	134 485	133 286	267 771	100.90
21	Padang Lawas	137 996	137 519	275 515	100.35
22	Labuhanbatu Selatan	169 807	163 115	332 922	104.10
23	Labuhanbatu Utara	182 187	178 739	360 926	101.93
24	Nias Utara	67 823	69 179	137 002	98.04
25	Nias Barat	39 045	42 618	81 663	91.62
Kota					
26	Sibolga	43823	43 494	87 317	100.76
27	Tanjungbalai	87 277	86 025	173 302	101.46
28	Pematangsiantar	123 578	129 922	253 500	95.12
29	Tebing Tinggi	80 317	82 264	162 581	97.63
30	Medan	1 118 402	1 145 743	2 264 145	97.61
31	Binjai	136 714	137 178	273 892	99.66
32	Padangsidempuan	106 673	112 219	218 892	95.06
33	Gunungsitoli	69 014	71 913	140 927	95.97
Sumatera Utara		7 193 200	7 222 191	14 415 391	99.60

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Penduduk Hasil SP2010)

Rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 99,60 yang artinya terdapat 99 orang penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100 sementara sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota mempunyai rasio jenis kelamin diatas 100. Itu artinya bahwa lebih banyak wilayah yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada penduduk laki-lakinya.

Bila dilihat dari kelompok umur, maka dapat dilihat menurut klasifikasi kelompok umur produktif dan kelompok umur non produktif sehingga dapat dilihat juga rasio ketergantungan dari masing-masing jenis kelamin. Kelompok umur non produktif terdiri dari kelompok umur muda dan kelompok umur tua, dimana kelompok umur muda adalah penduduk yang masuk kelompok umur 0-14 tahun, sementara kelompok umur tua adalah penduduk dengan kelompok umur 65 keatas. Sementara itu kelompok umur produktif adalah penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun.

**Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan
Tahun 2018**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Usia Non Produktif	2 586 084	2 570 330	5 156 414	101
0-14	2 304 102	2 212 218	4 516 320	104
65+	281 982	358 112	640 094	79
Usia Produktif				
15-64	4 607 116	4 651 861	9 258 977	99
Rasio Ketergantungan	56,13	55,25	55,69	
Anak-anak	50,01	47,56	48,78	
Lansia	6,12	7,70	6,91	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Penduduk Hasil SP2010)

Tabel 2.2 menunjukkan jumlah penduduk Sumatera Utara pada kelompok umur muda (0-14 tahun) lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang tercermin dari rasio jenis kelamin sebesar 104. Artinya bahwa terdapat 104 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Sementara pada kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 99, yang

artinya bahwa terdapat 99 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Begitu juga di kelompok umur tua 65 tahun keatas lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 76, yang artinya bahwa terdapat 76 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

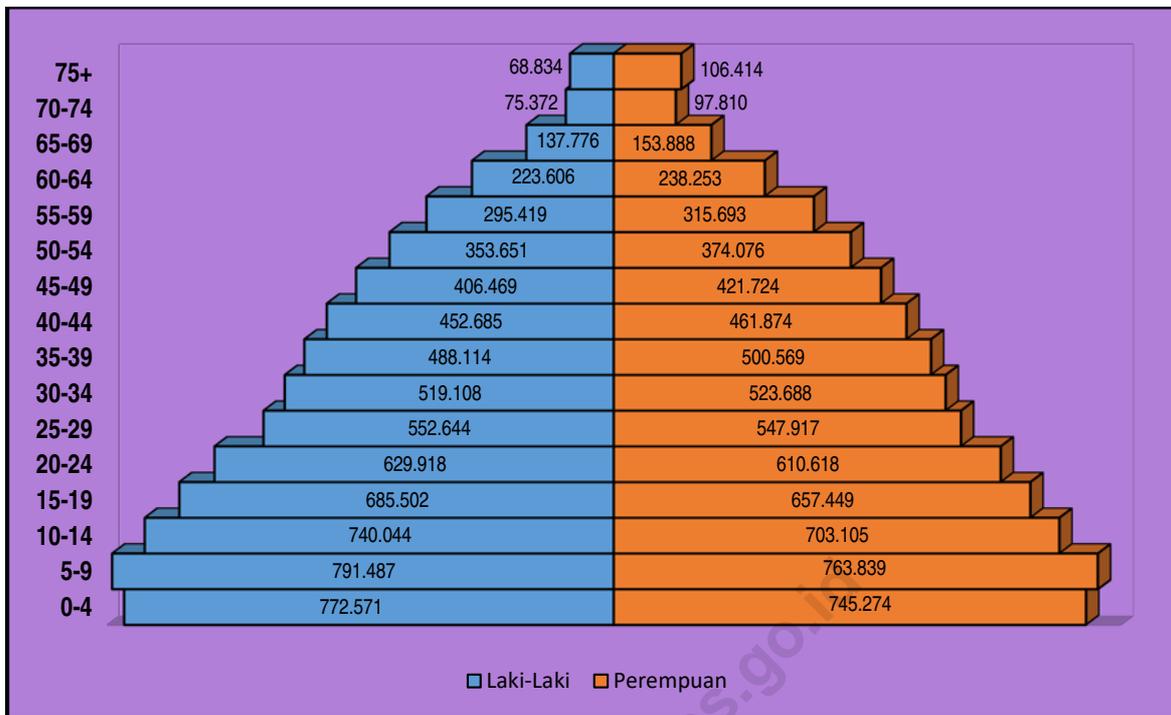
Rasio ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi yang harus ditanggung kelompok umur produktif terhadap kelompok umur muda dan tua. Semakin kecil angka rasio ketergantungan, semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk umur tidak produktif, dan begitu juga sebaliknya. Angka rasio ketergantungan Sumatera Utara Tahun 2018 sebesar 55,69, artinya bahwa dari 100 penduduk umur produktif harus menanggung 55 penduduk umur tidak produktif baik itu anak-anak maupun lansia. Bila dilihat lebih rinci lagi, terlihat bahwa angka ketergantungan anak-anak lebih besar dibanding angka ketergantungan lansia. Hal ini dapat diartikan bahwa beban tanggungan anak-anak adalah yang paling berperan dalam besarnya beban tanggungan total.

2.2 Struktur Umur Penduduk

Struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen yang penting dalam demografi. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok interval umur, dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap keputusan yang akan diambil oleh penentu kebijakan suatu wilayah.

Struktur jumlah penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin digambarkan melalui piramida penduduk. Dengan piramida penduduk dapat terlihat apakah suatu wilayah termasuk ke dalam wilayah dengan pola piramida ekspansif (piramida penduduk muda), stasioner (piramida penduduk berimbang), atau konstruktif (piramida penduduk tua). Piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Utara tahun 2018 disajikan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Penduduk Hasil SP2010)

Pola distribusi penduduk Sumatera Utara pada gambar 2.1 menunjukkan tingkat fertilitas yang tinggi, ditandai dengan banyaknya penduduk yang berada di kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 1,5 juta jiwa, dan kelompok umur berikutnya mengikuti pola menurun. Pola distribusi penduduk seperti ini disebut pola piramida penduduk muda. Pola piramida penduduk muda menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Dengan jumlah penduduk muda yang besar, potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap menyediakan lapangan kerja yang cukup, karena permintaan tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah lapangan kerja akan menciptakan pengangguran.

Sementara itu, jika dilihat menurut komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk wanita berusia 15-64 tahun atau yang tergolong wanita usia subur di Sumatera Utara cukup tinggi yaitu sebanyak 4,65 juta orang atau sekitar 32,27 persen dari total penduduk Sumatera Utara. Komposisi ini akan sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas yang tinggi.

2.3 Status Perkawinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun keatas yang belum kawin lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan 10 tahun keatas yang belum kawin, yaitu sebesar 42,86 persen untuk penduduk laki-laki dan 34,10 persen untuk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa laki-laki cenderung lebih lama berstatus membujang dibandingkan perempuan. Artinya perempuan secara rata-rata kawin lebih muda dibandingkan laki-laki. Keadaan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2018

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Belum Kawin	42,86	34,10	38,45
Kawin	53,73	53,93	53,83
Cerai Hidup	1,06	2,00	1,53
Cerai Mati	2,35	9,97	6,19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan status yang sama. Ini berarti bahwa perempuan lebih tahan hidup menjanda dibandingkan laki-laki baik karena perceraian atau karena kematian pasangannya. Status perempuan yang menjanda, persentasenya lebih besar karena cerai mati (9,97%) dibanding karena perceraian dengan pasangan/cerai hidup (2,00%).

Uraian diatas memperlihatkan bahwa data mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah, terutama data kependudukan yang dibedakan menurut jenis kelamin merupakan data strategis bagi para pengambil kebijakan agar program-program yang nantinya akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Berikut ini dapat dilihat beberapa indikator kependudukan yang telah dirangkum dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.4 Keadaan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara
menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1 Jumlah Penduduk (orang)	7 193 200	7 222 191	14 415 391
2 Kelompok Umur (%)			
0-14 tahun	32,03	30,63	31,33
15-64 tahun	64,05	64,41	64,23
65+ tahun	3,92	4,96	4,44
3 Rasio Ketergantungan	56,13	55,25	55,69
Anak-anak	50,01	47,56	48,78
Lansia	6,12	7,70	6,91
4 Seks Rasio			99,60
5 Status Perkawinan (%)			
Belum Kawin	42,86	34,10	38,45
Kawin	53,73	53,93	53,83
Cerai Hidup	1,06	2,00	1,53
Cerai Mati	2,35	9,97	6,19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Hasil SP2010, Susenas 2018)

Pendidikan yang berkualitas menghasilkan SDM yang berdaya guna



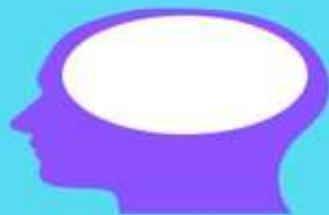
1.) ANGKA MELEK HURUF

Angka melek huruf sudah cukup tinggi kecuali pada kelompok umur 65 tahun keatas yang masih dibawah 95%

2.) PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Mayoritas penduduk Sumatera Utara yang berusia 10 tahun keatas menamatkan pendidikan di SMA yaitu sebesar 30,43%.

Masih ada sebanyak 1,52% yang tidak/belum pernah sekolah



3.) ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Angka partisipasi sekolah menurun seiring dengan meningkatnya golongan usia. Golongan usia 7-12 tahun (usia Sekolah Dasar) memiliki angka partisipasi sekolah yang relatif lebih tinggi (99,50%)

4.) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 111, artinya terdapat sebanyak 111 murid sekolah dasar dari 100 penduduk usia 7-12 tahun.



5.) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebesar 98, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 98 orang sudah mengikuti pendidikan sekolah dasar sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani pada umur tersebut.



BAB 3 PENDIDIKAN

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber dayanya. Pengalaman menunjukkan bahwa kebodohan dan kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai kebutuhan jaman. Dengan demikian, diharapkan dengan pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi dalam angkatan kerja sehingga pendapatan meningkat dan akhirnya mengurangi derajat kemiskinan absolut. Pendidikan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, atau gender.

Mengingat pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan usaha-usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat baik dari segi kualitas maupun pemerataan pendidikan. Masyarakat juga perlu terus didorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan.

Upaya perbaikan pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah secara bertahap sejak tahun 1994. Mulai tahun itu, pemerintah mulai melaksanakan program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian lamanya usia wajib belajar ini, diharapkan tingkat pendidikan masyarakat semakin baik. Bersamaan dengan itu, pembangunan sarana fisik

dan prasarana pendidikan juga terus dipacu sehingga penduduk usia sekolah dapat semakin mudah mengakses fasilitas pendidikan yang ada.

Peningkatan kualitas masyarakat tentunya tidak hanya terbatas pada golongan usia sekolah saja tetapi diharapkan dapat mencakup golongan usia menengah keatas. Wujud dari penerapan tujuan tersebut antara lain dengan dilaksanakannya program Kejar Paket A dan Kejar Paket B. Dengan adanya program ini, diharapkan kelompok penduduk yang tidak masuk dalam usia sekolah dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sejak tahun 2007 penghitungan angka partisipasi kasar juga memperhitungkan pendidikan Non Formal yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C.

Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar Penduduk menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
SD	110,57	111,66	111,10
SMP	91,77	88,08	89,98
SMA	87,47	95,65	91,57
PT	23,31	28,12	25,64

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Angka partisipasi kasar (APK) Sumatera Utara berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 111 artinya bahwa pada tahun 2018 terdapat sebanyak 111 murid sekolah dasar dari 100 penduduk usia 7-12 tahun. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 juga menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Utara mampu menampung penduduk usia Sekolah Dasar lebih dari target yang sesungguhnya. Dilihat menurut jenis kelamin, angka partisipasi kasar laki-laki dan perempuan sedikit berimbang dengan APK laki-laki adalah 111 dan APK perempuan sebesar 112.

Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama angka partisipasi kasar Sumatera Utara adalah sebesar 90 yang artinya dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, ditemui 90 yang berstatus murid SMP. Selanjutnya, angka partisipasi kasar untuk tingkat sekolah menengah atas adalah sebesar 92 pada tahun 2018 yang artinya pada tahun 2018, dari 100 penduduk usia 16-18 tahun terdapat 92 orang yang berstatus sebagai murid SMA. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka partisipasi kasar pada jenjang sekolah menengah baik menengah pertama maupun menengah atas angkanya cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi kasar masih cukup rendah yaitu sebesar 26, artinya dari 100 penduduk usia 19-24 tahun hanya terdapat 26 orang yang berstatus sebagai mahasiswa perguruan tinggi.

Angka partisipasi kasar perempuan yang cukup berimbang dengan laki-laki pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengindikasikan bahwa partisipasi sekolah perempuan tidak kalah jika dibandingkan dengan laki-laki. Adanya pola angka partisipasi kasar yang semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi juga cukup menentukan tingkat jenjang pendidikan yang akan dijalani seseorang. Kondisi sosial ekonomi yang serba pas-pasan masih relatif banyak mendorong pendidikan yang dimilikipun relatif rendah. Dengan kata lain, semakin sedikit penduduk yang mengenyam pendidikan seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikannya.

3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni Penduduk menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
SD	97,98	97,26	97,63
SMP	80,71	77,70	79,25
SMA	64,13	70,39	67,27
PT	17,31	20,71	18,96

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Pada tahun 2018, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi murni di Sumatera Utara sebesar 98. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 98 orang sudah mengikuti pendidikan sekolah dasar sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani pada umur tersebut. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, angka partisipasi murni jenjang tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 79. Angka ini berarti bahwa pada tahun 2018, dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ada sebanyak 79 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu sekolah menengah pertama. Selanjutnya, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2018 adalah sebesar 67. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2018, dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, ada sekitar 67 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu sekolah menengah atas.

Sementara di jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi murni pada tahun 2018 sebesar 19, artinya dari 100 penduduk usia 19-24 tahun, ada sekitar 19 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu perguruan tinggi. Sama halnya dengan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni juga mempunyai pola yang semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Secara aktual, evaluasi program pendidikan lebih tergambar oleh angka partisipasi sekolah, yaitu angka yang menunjukkan secara lebih tepat jumlah penduduk yang masih bersekolah menurut kelompok usianya. Indikator angka partisipasi sekolah sedikit berbeda dengan angka partisipasi kasar karena bila angka partisipasi kasar lebih menekankan pada keikutsertaan sekolah anak berdasarkan jenjang pendidikan sedangkan indikator angka partisipasi sekolah lebih menekankan pada keikutsertaan dari golongan usia pendidikan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
7 - 12	99,48	99,51	99,50
13 - 15	96,26	97,27	96,75
16 - 18	73,88	80,92	77,41
19 - 24	24,19	26,50	25,31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Angka partisipasi sekolah menurun seiring dengan meningkatnya golongan usia. Golongan usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang relatif lebih tinggi. Hal ini terlihat pada angka partisipasi sekolah di Sumatera Utara tahun 2018 yang sebesar 99,50. Selanjutnya, angka partisipasi sekolah golongan usia 13-15 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 96,75. Angka partisipasi sekolah golongan usia 16-18 tahun pada tahun 2018 sebesar 77,41. Sementara angka partisipasi sekolah golongan usia 19-24 tahun pada tahun 2018 hanya sebesar 25,31.

Dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa untuk penduduk Sumatera Utara pada tahun 2018, angka partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Namun demikian, angka partisipasi sekolah yang ada harus tetap ditingkatkan guna peningkatan sumber daya manusia yang ada.

3.4 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf. Persentase melek huruf didefinisikan sebagai besarnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis yang dimaksud disini adalah mampu membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dan lain-lain). Persentase melek huruf ini juga menggambarkan mutu sumber daya manusia karena dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat berkomunikasi dan menerima informasi dengan baik. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan bahwa semakin baik tingkat penerimaan informasi.

Berdasarkan data Susenas tahun 2018, seperti disajikan pada tabel 3.4, terlihat bahwa angka melek huruf di Sumatera Utara sudah cukup tinggi bahkan hampir mencapai 100 persen di semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 65 keatas yang masih di bawah 95 persen. Dari sisi gender, tidak terdapat perbedaan yang berarti antara angka melek huruf laki-laki dan angka melek huruf perempuan.

Angka melek huruf yang rendah pada kelompok umur 65 tahun keatas cukup dapat dimaklumi mengingat di masa lampau pendidikan masyarakat belum menganggap penting sekolah sehingga angka melek huruf pada kelompok usia tua relatif lebih kecil. Hal ini juga menunjukkan adanya keberhasilan program pemerintah

dalam hal pengentasan buta huruf yang ditandai dengan makin tingginya angka melek huruf seiring dengan penambahan kelompok umur.

Tabel 3.4 Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
10 - 14	99,63	99,72	99,67
15 - 24	99,93	99,74	99,84
25 - 40	99,87	99,65	99,76
41 - 64	99,40	98,53	98,95
65+	96,47	90,23	92,96

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang. Tabel 3.5 menunjukkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas di Sumatera Utara.

Pada tahun 2018, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 22,36 persen. Selanjutnya, yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah sebanyak 21,73 persen, diikuti Sekolah Menengah Atas sebesar 30,43 persen. Persentase penduduk yang telah menamatkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yaitu Diploma I, II, III sebesar 1,95 persen dan Diploma IV, S1 keatas sebesar 6,13 persen. Dari tabel 3.5 dapat terlihat juga bahwa masih ada penduduk usia 10 tahun keatas di Sumatera Utara yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 1,52 persen. Walaupun jumlahnya relatif kecil namun hendaknya ini tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari.

**Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
Tahun 2018**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,91	2,12	1,52
Tidak/Belum Tamat SD	14,80	16,93	15,87
SD	22,68	22,05	22,36
SMP	22,26	21,20	21,73
SMA	32,25	28,65	30,43
DIPLOMA I, II, III	1,38	2,52	1,95
DIPLOMA IV/ S1 keatas	5,72	6,54	6,13

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Dilihat dari jenis kelamin, tidak terlihat adanya perbedaan yang berarti antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan. Bahkan di jenjang pendidikan Diploma IV/S1 keatas persentase penduduk perempuan lebih besar dibanding jumlah persentase laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa sekarang ini kualitas sumber daya perempuan sudah dapat disejajarkan dengan laki-laki dalam hal mengenyam pendidikan.

KESEHATAN

Rakyat Sehat!

NEGARA KUAT

Angka kesakitan Sumatera Utara

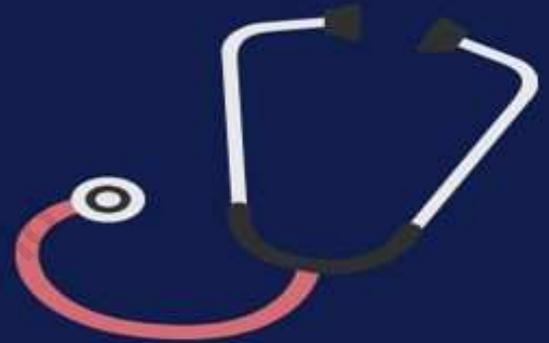
11,38%

Angka kesakitan Perkotaan

10,31%

Angka kesakitan Perdesaan

12,58%



Angka kesakitan di perkotaan lebih kecil dibanding di perdesaan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat perkotaan lebih baik dibanding masyarakat di perdesaan.

MENJAGA KESEHATAN
LEBIH BAIK daripada **MENGOBATI**

Angka kesakitan laki-laki = 11,03
Angka kesakitan perempuan = 11,73

Angka kesakitan tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan

Morbidity Rate



BAB 4 KESEHATAN

Kualitas kesehatan suatu bangsa merupakan modal dasar untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia dengan kualitas kesehatan yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi percepatan pembangunan negeri tersebut. Investasi di bidang kesehatan, selain juga di bidang pendidikan, merupakan investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas utama agar tercapai semua program pembangunan. Hal ini akan menentukan kualitas dan nasib bangsa di kemudian hari.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan agar timbul kesadaran dari diri sendiri dalam menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatannya. Secara kualitas dan kuantitas, penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga harus terus ditingkatkan.

Peningkatan derajat kesehatan manusia harus dimulai dari sejak awal seorang manusia masih dalam kandungan. Pendekatan pembangunan kesehatan pada ibu hamil, bayi dan balita dengan pemberian ASI dan imunisasi, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur, serta usia lanjut dengan memberikan jaminan sosial. Kebutuhan-kebutuhan pada setiap tahap kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Pendekatan keluarga menjadi sasaran utama untuk mencapai keluarga yang sehat. Selain itu, paradigma kesehatan harus ditanamkan di masyarakat bahwa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga.

Isu gender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/kebijakan kesehatan. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

4.1 Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Angka kesakitan/morbiditas (*Morbidity Rate*) adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Berdasarkan hasil Susenas 2018 diketahui bahwa di Sumatera Utara ada sekitar 11 persen penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir. Dilihat menurut wilayah, persentase penduduk perdesaan yang menderita sakit selama sebulan terakhir lebih besar dibanding penduduk perkotaan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat perkotaan lebih baik dibanding masyarakat di perdesaan.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
SUMATERA UTARA	11,03	11,73	11,38
- Perkotaan	9,95	10,68	10,31
- Perdesaan	12,25	12,91	12,58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

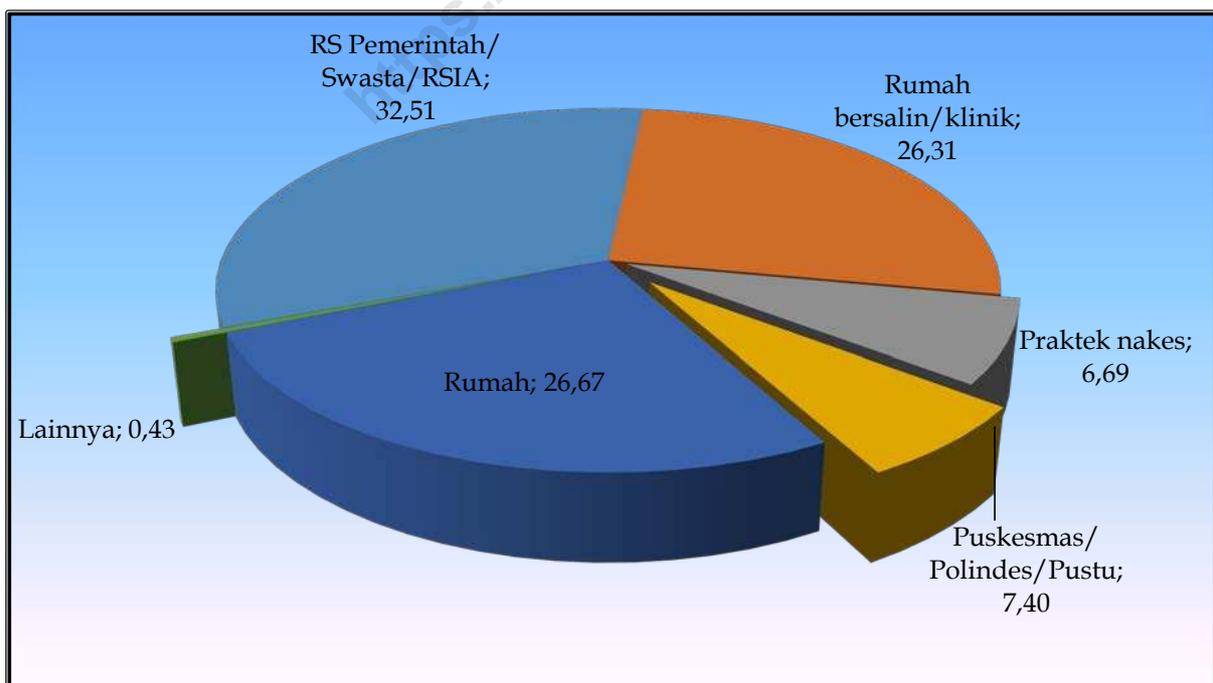
4.2 Fasilitas Tempat Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya AKI adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan. Pemilihan tempat untuk melahirkan memiliki dampak yang besar pada pengalaman persalinan sang ibu. Faktor pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab dasar pemilihan tempat bersalin.

Pada tahun 2018 persentase ibu di Sumatera Utara yang melahirkan di rumah berdasarkan hasil Susenas 2018 masih cukup besar yaitu sebesar 26,67 persen. Sebagian masyarakat memilih untuk melahirkan di rumah dengan berbagai alasan, baik pertimbangan faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal misalnya akibat pengaruh norma, budaya, atau agama. Sementara faktor internal adalah keinginan untuk melahirkan di dalam lingkungan yang akrab dengan dikelilingi orang-orang tercinta. Untuk kondisi kehamilan yang tidak bermasalah dalam arti tidak pernah mengalami riwayat melahirkan yang sulit, melahirkan di rumah mungkin akan menjadi pilihan yang tidak masalah walaupun resiko yang terjadi pada saat melahirkan tidak terprediksi.

Tempat kedua yang dipilih para ibu di Sumatera Utara sebagai tempat melahirkan adalah di fasilitas kesehatan rumah bersalin/klinik yaitu sebesar 26,31 persen. Faktor kenyamanan merupakan salah satu alasan seorang ibu memilih melakukan persalinan di rumah bersalin/klinik, selain juga faktor ekonomi.

Gambar 4.1 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2018

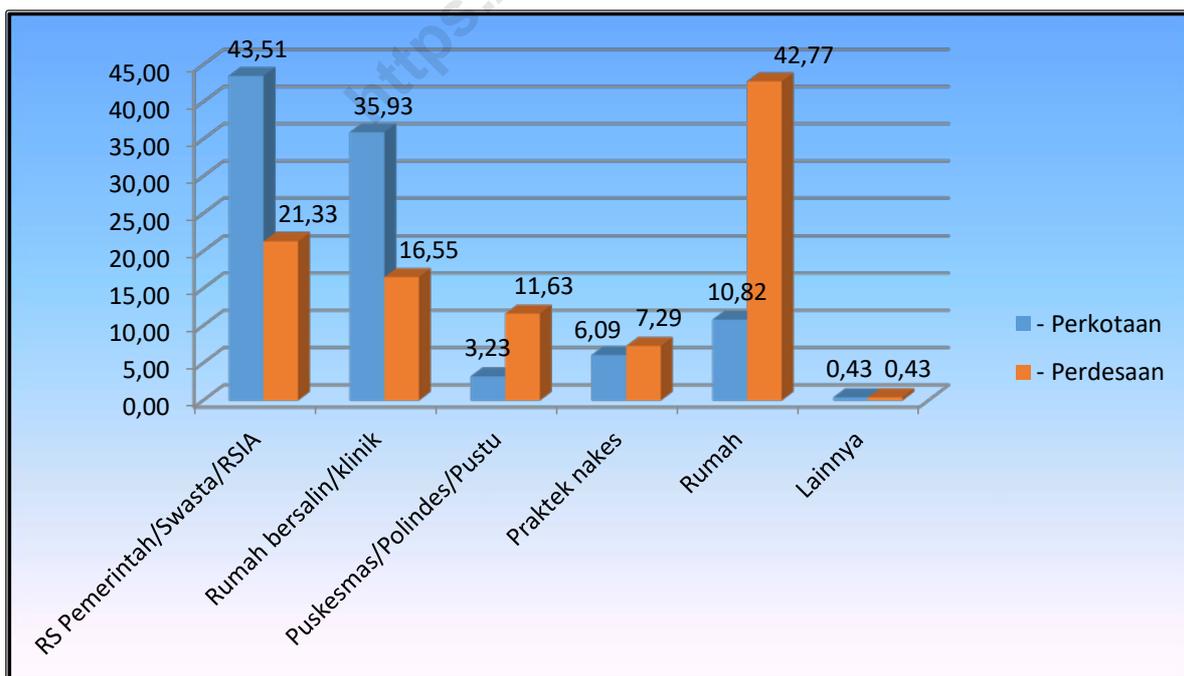


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Rumah Sakit Pemerintah/Swasta/RSIA menjadi pilihan sebanyak 32,51 persen ibu di Sumatera Utara sebagai tempat untuk melakukan persalinan. Alasan yang mendasari bisa bervariasi, ada yang karena memang harus dirujuk yang membutuhkan penanganan secara khusus dari rumah sakit. Atau ada juga yang menginginkan berbagai fasilitas eksklusif dari tempat persalinan tersebut dan lain-lain. Sementara itu yang memilih bersalin di puskesmas/polindes/pustu ada sebanyak 7,40 persen, praktek Nakes 6,69 persen, serta lainnya sebanyak 0,43 persen.

Dilihat menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, masyarakat perkotaan mayoritas memilih bersalin di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta/RSIA, yaitu sebesar 43,51 persen. Tempat kedua yang dipilih masyarakat perkotaan untuk melakukan persalinan adalah Rumah bersalin/klinik sebanyak 35,93 persen. Sementara itu, yang memilih rumah sebagai tempat bersalin hanya 10,82 persen. Sisanya sebanyak 6,09 persen memilih praktek nakes, 3,23 persen memilih puskesmas/polindes/pustu dan sebanyak 0,43 persen memilih lainnya sebagai tempat bersalin.

Gambar 4.2 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Wilayah dan Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, di perdesaan mayoritas masyarakat desa masih lebih memilih rumah sebagai alternatif pertama mereka melakukan persalinan (42,77 persen). Pilihan masyarakat perdesaan untuk lebih memilih melahirkan di rumah tidak terlepas dari faktor keluarga, kebiasaan turun temurun yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya. Kebanyakan orangtua yang dahulu melahirkan anak-anaknya di rumah cenderung akan menyarankan anak perempuannya untuk melahirkan di rumah juga. Selain faktor kenyamanan menjadi alasan utama para orang tua menyarankan melahirkan di rumah, alasan lain adalah memperkecil intervensi terhadap ibu yang melahirkan di rumah, misalnya episiotomy (pelebaran jalan lahir untuk mempermudah proses persalinan) dan juga biaya yang lebih rendah.

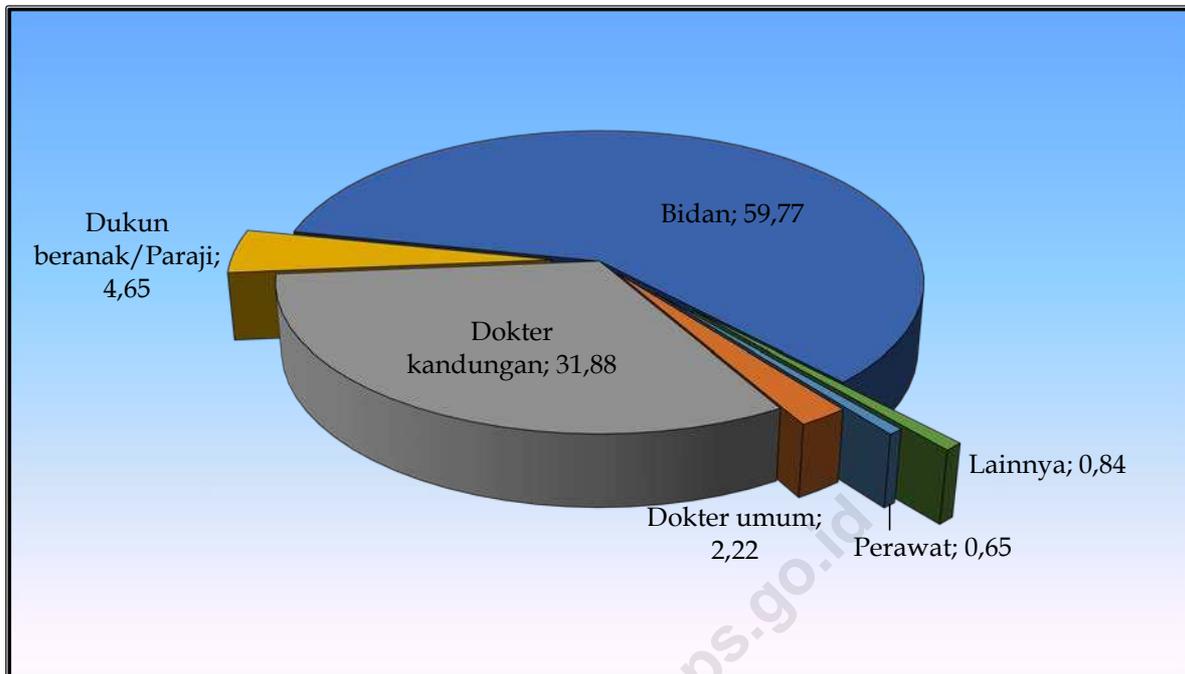
Tempat kedua yang dipilih masyarakat di perdesaan melakukan persalinan adalah Rumah Sakit Pemerintah/Swasta/RSIA yaitu sebanyak 21,33 persen. Sementara yang melakukan persalinan di rumah bersalin/klinik ada sebanyak 16,55 persen dan di puskesmas/polindes/pustu ada sebanyak 11,63 persen. Pilihan tempat bersalin di praktek nakes dan lainnya persentasenya sangat kecil dibawah 10 persen.

4.3 Penolong Persalinan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan yang tidak kalah pentingnya adalah penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan. Data mengenai penolong persalinan menjadi sangat penting karena penolong kelahiran sangat mempengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkan. Persalinan yang ditolong oleh dokter dan bidan dipandang lebih baik dari segi kesehatan dibandingkan persalinan yang ditolong oleh dukun atau tenaga nonmedis lainnya.

Masyarakat tradisional memiliki kecenderungan menggunakan tenaga dukun dalam membantu proses persalinannya dengan peralatan yang digunakan sederhana dan tidak steril sehingga sangat berbahaya dalam proses persalinan. Di masa sekarang ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kesehatan khususnya dalam hal penurunan angka kematian bayi. Banyak hal yang telah dilakukan guna menurunkan angka kematian bayi, diantaranya dengan menyediakan tenaga bidan sampai tingkat desa (yang dikenal dengan bidan desa) dan pemberian pelatihan kepada dukun tentang cara penanganan persalinan yang sesuai dengan standar medis.

Gambar 4.3 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Penolong Persalinan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2018 persentase persalinan di Sumatera Utara dengan ditolong oleh bidan menduduki peringkat pertama. Sebanyak 59,77 persen penolong persalinan dilakukan oleh bidan. Di peringkat kedua, penolong persalinan dilakukan oleh dokter kandungan yaitu sebanyak 31,88 persen. Penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis lainnya seperti perawat, dokter umum, maupun oleh tenaga dukun beranak dan lainnya persentasenya sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Sumatera Utara akan pentingnya peran penolong persalinan sudah sangat baik. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu di Sumatera Utara dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

4.4 Lama Pemberian ASI

Air Susu Ibu (ASI) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan anak sejak dilahirkan. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi. Banyak keunggulan ASI yang tidak dapat digantikan oleh susu lainnya seperti mengandung lebih banyak gizi dan paling sempurna untuk pertumbuhan anak, dapat menjaga kekebalan tubuh anak

sehingga anak lebih kebal terhadap berbagai penyakit, dan yang jelas lebih hemat dan ekonomis.

Kebijakan pemerintah melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian dianjurkan untuk tetap diberikan berdampingan dengan makanan padat sampai usia 2 tahun atau lebih. Rata-rata lamanya pemberian ASI kepada baduta (bayi dibawah dua tahun) di Sumatera Utara menurut Susenas 2017 adalah 9,8 bulan. Sementara itu rata-rata pemberian ASI eksklusif di Sumatera Utara adalah 3,9 bulan. Kondisi ini masih jauh di bawah anjuran pemerintah yang menganjurkan pemberian ASI sampai dengan usia anak 2 tahun atau lebih dengan masa ASI eksklusif adalah 6 bulan.

**Tabel 4.2 Lama Pemberian Air Susu Ibu Pada Balita
Tahun 2017**

Lamanya Pemberian ASI (bulan)	2017
0	2,49
1 - 5	23,29
6 - 11	35,13
12 - 17	26,56
18 - 23	12,53
Rata-Rata Pemberian Asi (bulan)	9,77
Rata-Rata Pemberian Asi Eksklusif (bulan)	3,87

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2017)

Kesadaran para ibu di Sumatera Utara untuk memberikan ASI secara optimal kepada balita masih tergolong rendah. Mayoritas ibu di Sumatera Utara hanya memberikan ASI pada balitanya selama 6-11 bulan yaitu sebanyak 35,13 persen. Sementara para ibu yang memberikan ASI selama 18-23 bulan hanya sebanyak 12,53 persen. Bahkan masih ada ibu yang memberikan ASI tidak sampai 1 bulan kepada balitanya (2,49%).

Hal-hal yang mungkin menjadi faktor penyebabnya salah satunya adalah pengetahuan sang ibu tentang menyusui masih kurang. Pengetahuan sekitar menyusui yaitu yang meliputi cara menyusui yang benar, tentang cara menyimpan ASIP, cara perawatan payudara, posisi menyusui yang benar dan informasi/nasihat yang sudah pernah diterima ibu, baik sebelum persalinan maupun pascapersalinan oleh tenaga kesehatan (nakes).

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), yaitu pemberian ASI segera setelah proses persalinan selesai. Inisiasi Menyusui Dini memberikan kesempatan pada bayi untuk mulai menyusu dengan segera setelah bayi dilahirkan. Salah satu manfaat dari inisiasi dini untuk bayi adalah dapat menghindari dan mengurangi stress pada bayi. Dengan inisiasi tersebut bayi jauh lebih tenang dan denyut jantungnya lebih stabil. Selain itu, dampak dari pemberian ASI pada jam-jam pertama melahirkan dapat menekan angka kematian bayi pada saat beberapa bulan kehidupan pertamanya. Inisiasi menyusui dini merupakan langkah awal untuk memberikan ASI secara eksklusif pada bayi.

Tabel 4.3 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Wilayah dan Lamanya Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2017

Wilayah	% Inisiasi Menyusui Dini	Saat mulai diletakkan di dada ibu setelah melahirkan		Lama proses menempelkan bayi baru lahir di dada ibu	
		< 1 jam	>= 1 jam	< 1 jam	>= 1 jam
SUMATERA UTARA	48,02	80,13	19,87	81,95	18,05
- Perkotaan	52,10	82,43	17,57	83,13	16,87
- Perdesaan	44,07	77,50	22,50	80,59	19,41

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2017)

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa persentase wanita usia subur 15-49 tahun yang melakukan IMD adalah sebesar 48,02 persen. Untuk wilayah perkotaan jumlahnya lebih besar dibanding wilayah perdesaan. Untuk wilayah perkotaan, ada sebanyak 52,10 persen wanita usia subur 15-49 tahun yang melakukan IMD, sementara untuk wilayah perdesaan ada sebanyak 44,07 persen.

Proses inisiasi menyusui dini dimulai dengan meletakkan bayi di dada ibu setelah lahir. Hal tersebut bisa meningkatkan ikatan batin ibu dan anak karena ada kontak fisik secara langsung. Berdasarkan hasil Susenas 2017, mayoritas ibu di Sumatera Utara mulai meletakkan bayi di dada setelah melahirkan dilakukan pada kurang dari satu jam setelah melahirkan yaitu sebesar 80,13 persen. Sementara lamanya proses menempelkan bayi baru lahir di dada ibu mayoritas adalah kurang dari satu jam yaitu sebanyak 81,95 persen. Pola kondisi ini pada wilayah perkotaan dan perdesaan adalah sama, yaitu mayoritas ibu mulai meletakkan bayi di dada setelah melahirkan adalah kurang dari satu jam, dan lamanya proses menempelkan bayi baru lahir di dada ibu adalah kurang dari satu jam.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk menjamin tercapainya target ASI eksklusif yang telah ditetapkan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450/MENKES/IV/2004 tanggal 7 April 2004 menekankan pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia selama 6 bulan dan menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen. Dalam peraturan ini juga ditetapkan bahwa tenaga kesehatan harus menginformasikan pemberian ASI eksklusif kepada ibu dengan mengacu pada 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui. Pada Tahun 2012, pemerintah telah membuat dasar regulasi peraturan pendukung ASI yang diatur dalam PP Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif.

Faktor lain yang berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI kepada bayi adalah faktor dukungan keluarga terutama dari suami. Sebuah penelitian mengatakan ibu yang suaminya mendukung pemberian ASI eksklusif berpeluang memberikan ASI eksklusif 2 (dua) kali daripada ibu yang suaminya tidak mendukung pemberian ASI eksklusif. Pada pasal 2 PP Nomor 33 tahun 2012 disebutkan bahwa pengaturan pemberian ASI eksklusif salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

Masih rendahnya persentase lama pemberian ASI dan ASI eksklusif pada balita di Sumatera Utara mengindikasikan masih perlu ditingkatkannya sosialisasi akan pentingnya pemberian ASI selama dua tahun atau lebih dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Peran serta dan dukungan dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan tersebut. Peran aktif sang ibu dengan menambah pengetahuan seputaran menyusui juga ikut berpengaruh.

4.5 Pemberian Imunisasi

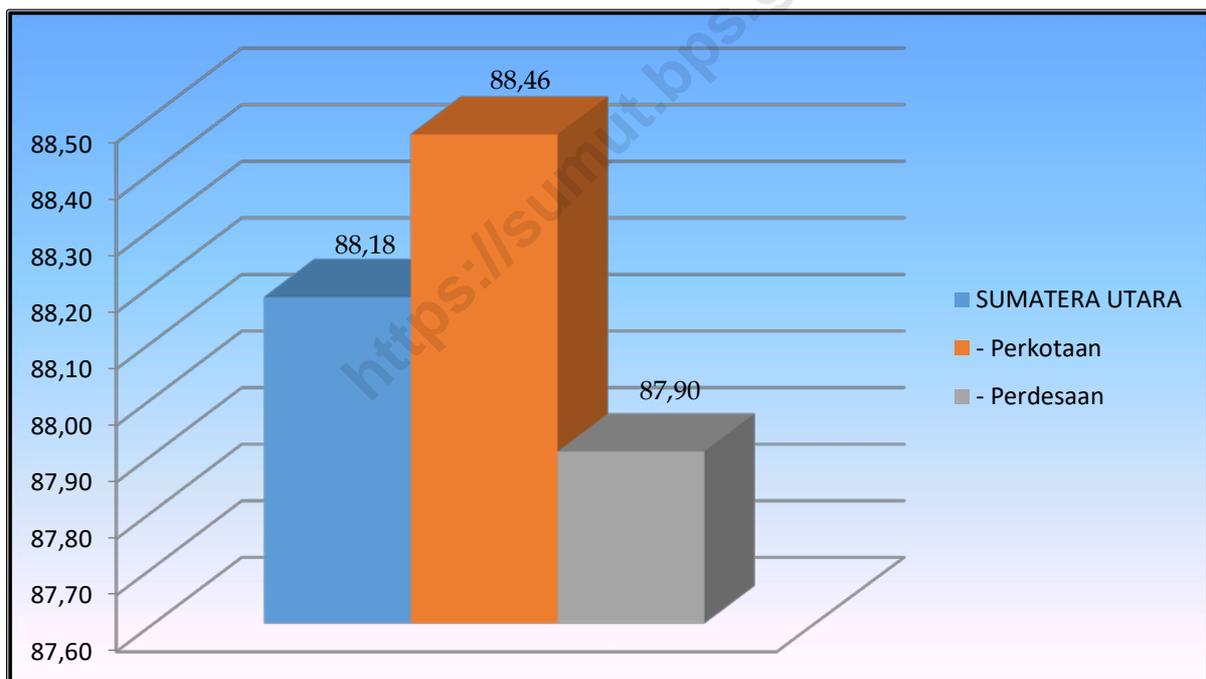
Selain penolong persalinan dan pemberian ASI, yang tak kalah penting dalam menjaga kesehatan balita dan mengurangi angka kematian bayi dan balita adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan terus-menerus, menyeluruh, dan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutuskan rantai penularan penyakit.

Beberapa imunisasi pokok dan wajib untuk diberikan kepada anak yang dianjurkan oleh pemerintah untuk anak balita adalah:

1. Imunisasi Polio, bertujuan untuk melindungi tubuh dari serangan virus polio, yaitu virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan, sesak napas, dan terkadang kematian. Vaksin ini diberikan 5 kali yaitu pada saat bayi baru lahir, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan 15 bulan.
2. Imunisasi Campak, bertujuan untuk melindungi dari virus campak, yaitu penyakit virus yang menyebabkan demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, radang mata, dan ruam. Vaksin campak diberikan pada saat anak berusia 9 bulan, dua tahun dan enam tahun.
3. Imunisasi DPT atau singkatan dari Difteri, Pertusis dan Tetanus, bertujuan untuk memberi kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis dan tetanus. Difteri merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan sesak napas, radang paru-paru, hingga masalah pada jantung dan kematian. Pertusis lebih dikenal dengan sebutan batuk rejan. Sedangkan Tetanus merupakan penyakit kejang dan kaku otot yang sama memamatkannya. Pemberian imunisasi DPT dilakukan 5 (lima) kali yaitu pada saat anak berusia dua bulan, tiga bulan, empat bulan, satu setengah tahun, dan lima tahun.

4. Imunisasi BCG, untuk memberikan kekebalan terhadap kuman TBC, yaitu kuman yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis. Penyakit ini merupakan penyakit serius yang dapat ditularkan melalui hubungan dekat dengan orang yang terinfeksi TB, seperti hidup di rumah yang sama. Vaksin ini diberikan hanya satu kali, yaitu pada saat anak baru dilahirkan hingga berusia 2 bulan.
5. Imunisasi Hepatitis B (HB), yang bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap agen hepatitis. Hepatitis B merupakan salah satu penyakit infeksi hati berbahaya yang disebabkan oleh virus melalui cairan tubuh dan darah. Biasanya diberikan pada saat anak berusia 2 tahun dan diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu sekitar 6-12 bulan.

**Gambar 4.4 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi
menurut Wilayah Tahun 2017**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2017)

Berdasarkan hasil Susenas 2017, persentase balita di Sumatera Utara yang pernah diimunisasi mencapai 88,18 persen. Dirinci menurut wilayah, persentase balita yang pernah diimunisasi di perkotaan lebih banyak dibanding balita di perdesaan, yaitu 88,46 persen berbanding 87,90 persen.

Pemberian imunisasi yang pokok dan wajib diberikan sesuai anjuran pemerintah yaitu BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B di Sumatera Utara tergolong masih cukup

rendah. Hasil Susenas 2017 menunjukkan persentase balita di Sumatera Utara yang telah diimunisasi BCG adalah sebesar 83,12 persen, DPT sebesar 75,86 persen, Polio sebesar 84,49 persen, Campak sebesar 65,39 persen, dan Hepatitis B sebesar 70,17 persen. Sesuai program pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan, telah ditetapkan target cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2017 adalah sebesar 92%. Menurut Kementerian Kesehatan, beberapa alasan yang membuat para ibu tidak melakukan imunisasi pada balitanya antara lain:

1. Kurang informasi
 - a. Kurang menyadari kebutuhan untuk imunisasi
 - b. Kurang menyadari kebutuhan kembali untuk diimunisasi
 - c. Tidak tahu tempat dan atau waktu imunisasi
 - d. Takut efek samping
 - e. Anggapan salah tentang kontra indikasi
2. Kurang motivasi
 - a. Menunda di lain waktu
 - b. Tidak percaya imunisasi
 - c. Desas desus tentang imunisasi

**Tabel 4.4 Persentase Balita yang Diberi Imunisasi
Tahun 2017**

Jenis Imunisasi	2017
BCG	83,12
Polio	84,49
DPT	75,86
HB	70,17
Campak	65,39
MMR	30,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2017)

Selain imunisasi dasar yang bersifat wajib, ada juga jenis imunisasi yang bersifat alternatif, yang merupakan imunisasi lanjutan dari imunisasi dasar, salah satunya adalah imunisasi MMR. Imunisasi MMR merupakan pemberian vaksin MMR yang

merupakan vaksin kombinasi. Vaksin ini merupakan gabungan antara vaksin campak, gondong dan campak Jerman. Imunisasi MMR diberikan sebanyak dua kali, yaitu saat anak berusia satu tahun tiga bulan dan saat anak berusia 15-18 bulan dengan minimal jarak 6 bulan dengan pemberian imunisasi campak. Pemberian berikutnya adalah saat anak berusia 6 tahun. Terkait dengan imunisasi lanjutan, Kementerian Kesehatan telah mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar lengkap dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa persentase balita di Sumatera Utara yang telah diberi imunisasi MMR masih cukup kecil (30,62%). Imunisasi MMR masih belum menjadi target utama para ibu di Sumatera Utara untuk diberikan kepada balitanya karena imunisasi MMR memang belum menjadi imunisasi wajib yang harus diberikan kepada balita.

Untuk mencapai terbentuknya kekebalan masyarakat yang tinggi, dibutuhkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang tinggi dan merata di seluruh wilayah, bahkan sampai tingkat desa. Bila tingkat kekebalan masyarakat tinggi, maka yang akan terlindungi bukan hanya anak-anak yang mendapatkan imunisasi tetapi juga seluruh masyarakat.

Dalam rangka mencapai cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di setiap wilayah, Menteri Kesehatan mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah agar (1) mengatasi dengan cermat hambatan utama di masing-masing daerah dalam pelaksanaan program imunisasi; (2) menggerakkan sumber daya semua sektor terkait termasuk swasta; dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi rutin lengkap sehingga mau dan mampu mendatangi tempat pelayanan imunisasi.

Catatan:

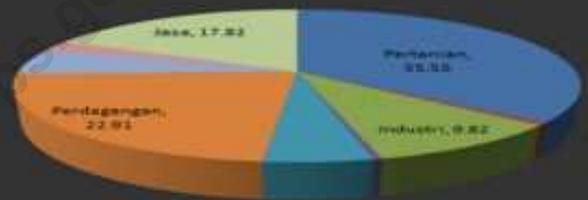
Data mengenai pemberian ASI dan imunisasi pada balita tidak dicakup dalam Susenas 2018 karena sudah dicatat pada kegiatan pendataan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga data yang di tampilkan adalah data tahun 2017.

KETENAGAKERJAAN



TPAK SUMUT

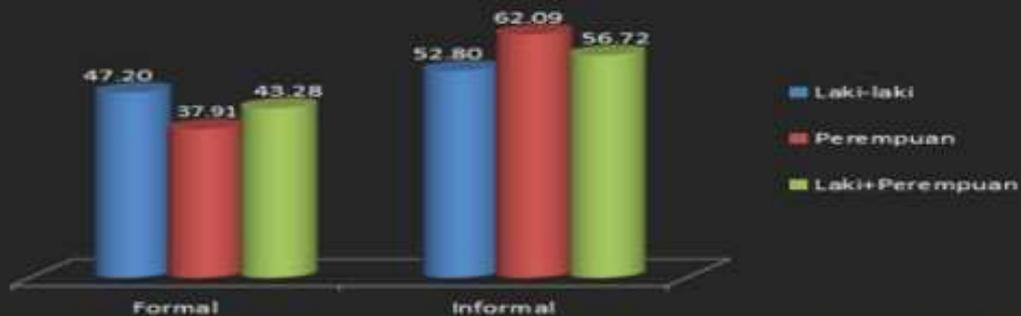
TPAK LAKI-LAKI (83,98%) LEBIH BESAR DIBANDING
TPAK PEREMPUAN (59,97%)



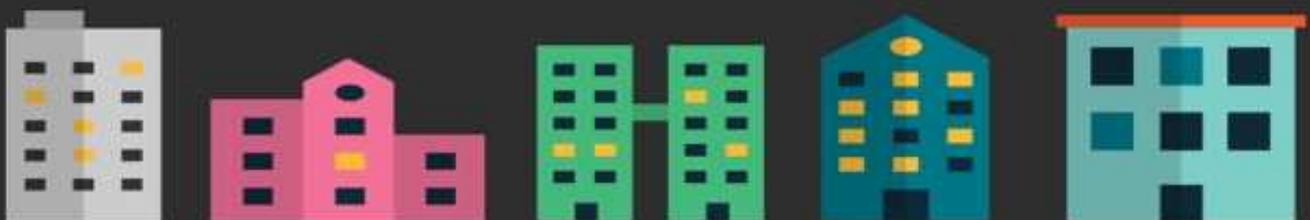
Mayoritas penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor Pertanian.

Sektor-sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri

PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL



Jumlah pekerja di sektor informal lebih banyak dibanding jumlah pekerja di sektor formal, baik laki-laki maupun perempuan.



BAB 5 KETENAGAKERJAAN

Aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dibahas jika dikaitkan dengan gender. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah bila terjadi perlakuan yang berbeda, jika tidak dibilang diskriminasi, terhadap pekerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja wanita di beberapa lapangan pekerjaan yang pada umumnya masih didominasi pekerja laki-laki, masih menjadi polemik tersendiri bagi para pengusaha untuk menggantikannya dengan pekerja perempuan. Begitupun sebaliknya, untuk beberapa lapangan pekerjaan yang biasanya diisi oleh pekerja perempuan, masih ada risih jika dilakukan oleh pekerja laki-laki.

Perbedaan-perbedaan perlakuan tersebut terjadi berkaitan dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti pendidikan, kesempatan kerja yang ada serta faktor-faktor sosial budaya lainnya. Pandangan masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam bekerja, yaitu untuk ikut membantu ekonomi rumah tangga, juga ikut andil dalam menciptakan perbedaan perlakuan tersebut.

Kesetaraan gender sebenarnya menginginkan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang tidak kalah dengan laki-laki. Terlepas dari kodrat utama perempuan yaitu mengurus rumah tangga, kebutuhan untuk mengekspresikan potensi lain dalam diri perempuan menjadi alasan bagi perempuan untuk ikut terjun dalam dunia ketenagakerjaan.

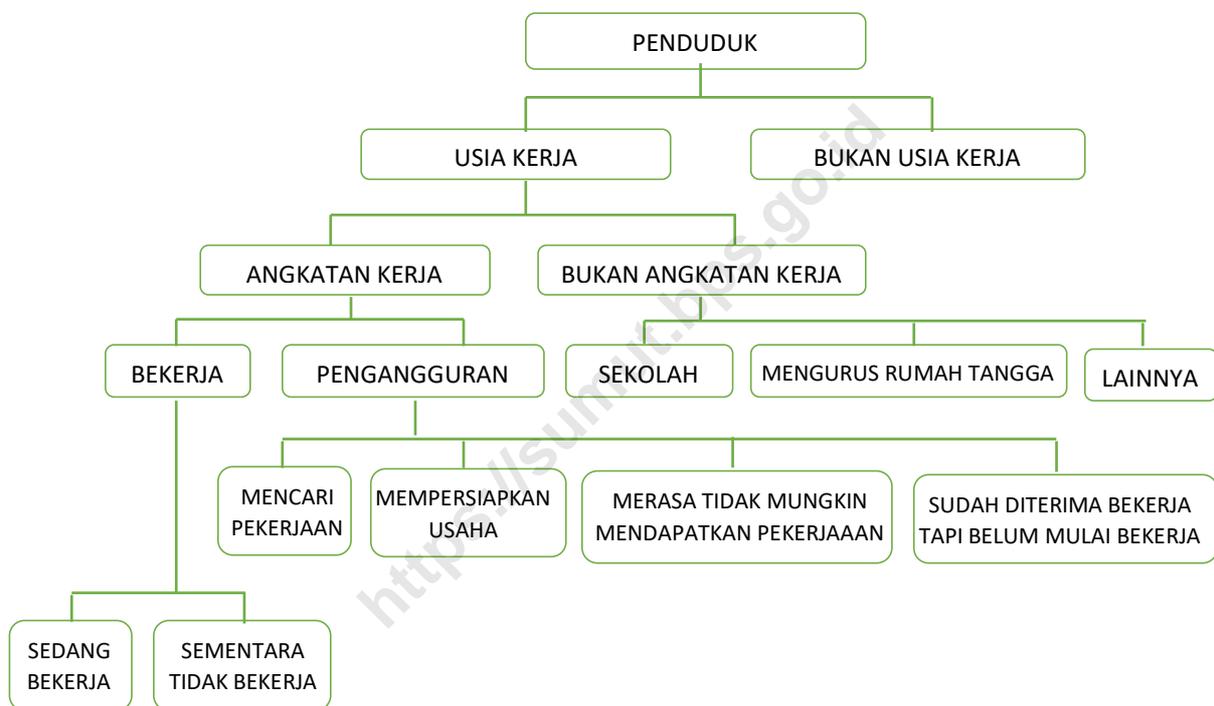
Data ketenagakerjaan yang dirinci menurut gender dapat memberikan informasi yang penting mengenai besarnya potensi penduduk laki-laki dan perempuan yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut diperlukan sebagai informasi bagi perencanaan maupun evaluasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Konsep dasar ketenagakerjaan yang digunakan BPS membagi dua kelompok penduduk menjadi kelompok penduduk yang masuk usia kerja dan kelompok penduduk yang bukan usia kerja. Penduduk usia kerja mengacu pada usia 15 tahun keatas dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15

tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

Gambar 5.1 Diagram Ketenagakerjaan



Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 71,82 persen. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2018, dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun keatas), terdapat diantaranya 72 orang yang masuk dalam angkatan kerja atau dengan kata lain, ada sekitar 72 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, yaitu sebesar 83,98 persen dibanding 59,97 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa keikutsertaan laki-laki yang aktif secara ekonomi masih lebih dominan dibanding perempuan. Kondisi ini dianggap wajar mengingat perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga dan bukan masuk dalam penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Laki-Laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	83,98	59,97	71,82
Bekerja	94,53	94,32	94,44
Pengangguran	5,47	5,68	5,56
Bukan Angkatan Kerja	16,02	40,03	28,18
Sekolah	54,48	21,78	30,96
Mengurus Rumah Tangga	18,42	71,82	56,84
Lainnya	27,10	6,39	12,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran (*unemployed*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena alasan ekonomis (merasa tidak akan memperoleh pekerjaan atau sedang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai) juga dikategorikan sebagai pengangguran. Penyebab dari pengangguran terbuka antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, tidak sesuai antara lapangan kerja dengan latar belakang

pencari kerja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras karena memang malas.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri, atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan data Sakernas 2018, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara adalah sebesar 5,56 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, angka pengangguran perempuan lebih tinggi dibanding dengan angka pengangguran laki-laki. Angka pengangguran perempuan adalah sebesar 5,68 persen, sementara angka pengangguran laki-laki adalah sebesar 5,47 persen.

5.3 Sektor Lapangan Pekerjaan Utama

BPS mengelompokkan sektor lapangan pekerjaan menjadi 9 (Sembilan) sektor, yaitu: (1) Sektor Pertanian, (2) Sektor Pertambangan, (3) Sektor Industri, (4) Sektor LGA (Listrik, Gas dan Air Minum), (5) Sektor Konstruksi, (6) Sektor Perdagangan, (7) Sektor Transportasi, (8) Sektor Keuangan, dan (9) Sektor Jasa. Dengan pengelompokkan sektor lapangan pekerjaan ini dapat dilihat struktur perekonomian suatu daerah. Daerah yang masih berkembang biasanya masih didominasi oleh sektor pertanian. Sementara daerah yang mulai maju cenderung didominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Dilihat dari sektor lapangan pekerjaan utama, mayoritas pekerja di Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian. Data Sakernas 2018 mencatat bahwa pada tahun 2018 persentase penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 35,53 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki usia kerja yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 37,66 persen, sedangkan penduduk perempuan adalah sebesar 32,62 persen.

Perbedaan jenis kelamin ternyata memengaruhi struktur lapangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan khususnya di luar sektor pertanian. Sektor-sektor yang lebih banyak menyerap pekerja perempuan adalah sektor perdagangan dan sektor jasa.

Persentase perempuan yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 30,42 persen dan di sektor jasa sebesar 23,87 persen. Sedangkan di sektor-sektor lainnya persentase pekerja laki-laki lebih besar terutama sektor konstruksi, transportasi dan industri.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Sektor Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1. Pertanian	37,66	32,62	35,53
2. Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,17	0,61
3. Industri	9,92	9,68	9,82
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,54	0,29	0,43
5. Konstruksi	8,86	0,31	5,25
6. Perdagangan	17,42	30,42	22,91
7. Transportasi	8,77	1,03	5,50
8. Lembaga Keuangan	2,49	1,63	2,13
9. Jasa	13,39	23,87	17,82

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

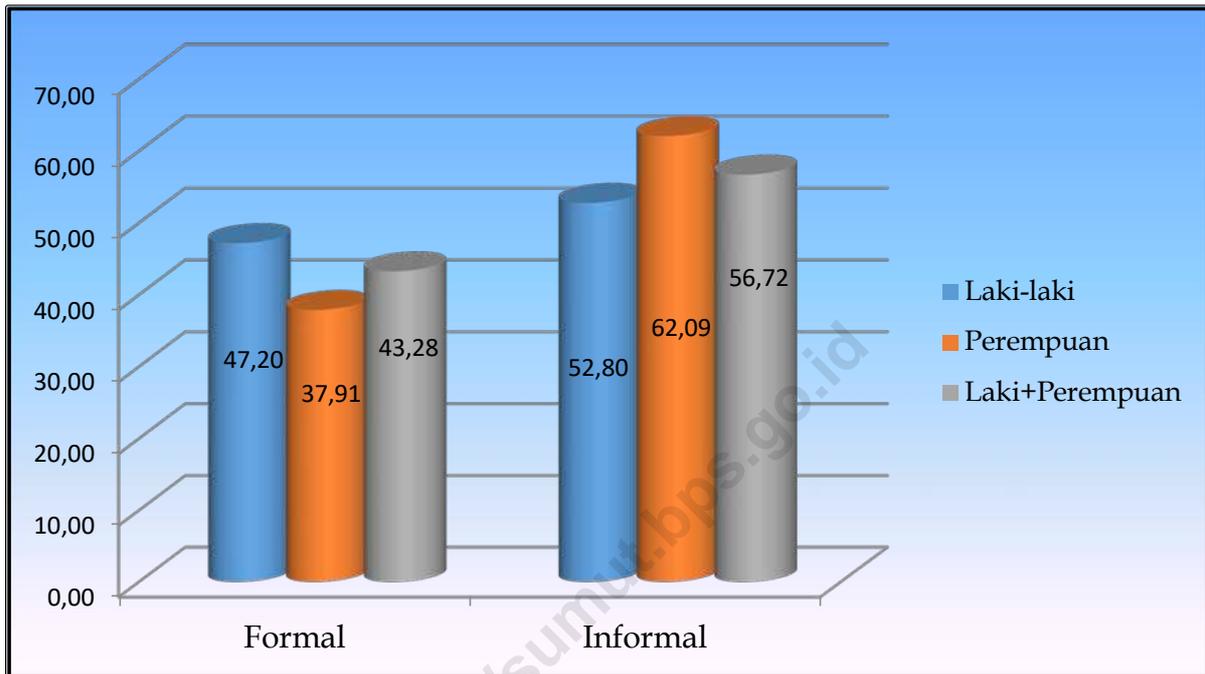
5.4 Pekerja Formal dan Informal

Pengkategorian sektor formal dan informal biasanya dikaitkan dengan status pekerjaan. Pekerja yang dikategorikan bekerja di sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Sisanya termasuk ke dalam pekerja yang bekerja di sektor informal.

Berdasarkan data Sakernas 2018, penduduk Sumatera Utara yang bekerja di sektor informal jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja di sektor formal. Persentase penduduk Sumatera Utara yang bekerja di sektor informal pada tahun 2018 adalah sebesar 56,72 persen. Sebaliknya, persentase penduduk usia kerja yang bekerja di sektor formal adalah sebesar 43,28 persen. Jika dilihat lebih jauh, sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor informal, bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar/pekerja keluarga (15,41%) dan sebagai pekerja keluarga (15,21%). Sementara dari jumlah penduduk yang bekerja

di sektor formal, mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan (40,04%) dan sisanya bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar (3,24%).

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

Dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa lebih dari separuh penduduk perempuan usia kerja bekerja di sektor informal yaitu sebesar 62,09 persen. Dan sebagian besar dari mereka yang bekerja di sektor informal bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Sedangkan untuk sektor formal, mayoritas penduduk perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan dan sisanya memiliki status sebagai pengusaha dengan memiliki buruh/karyawan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di dunia kerja masih belum terlihat eksistensinya.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1. Berusaha sendiri	18,72	18,90	18,80
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tdk dibayar/pekerja keluarga	16,09	14,49	15,41
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4,34	1,73	3,24
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	42,86	36,18	40,04
5. Pekerja Bebas di Pertanian	4,22	2,12	3,33
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian	5,58	1,76	3,97
7. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	8,19	24,82	15,21

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

5.5 Jam Kerja

Jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu dapat menunjukkan produktivitas pekerja dalam suatu jenis kegiatan pekerjaan. Seseorang dikatakan bekerja penuh (*full time worker*) jika jumlah jam kerja yang dijalannya memenuhi jumlah jam kerja normal atau diatas 35 jam selama seminggu. Mereka yang bekerja dengan jam kerja dibawah jam kerja normal atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dianggap sebagai pekerja tidak penuh. Termasuk ke dalam pekerja tidak penuh adalah mereka yang setengah menganggur dan pekerja paruh waktu.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jumlah Jam Kerja Seminggu (Jam)	Laki-laki	Perempuan	Total
1 - 14	5,44	10,89	7,74
15 - 34	20,38	29,38	24,18
1 - 34	25,82	40,27	31,92
0 dan 35+	74,18	59,73	68,08

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah jam kerja di atas jam kerja normal ada sebesar 68,08 persen. Sisanya sebanyak 31,92 persen masih bekerja dibawah jam kerja normal. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase pekerja perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal masih lebih besar dibanding pekerja laki-laki. Hal ini dirasa wajar mengingat jumlah pekerja perempuan banyak yang berstatus sebagai pekerja keluarga yang bekerja hanya bersifat membantu suami/keluarga.

5.6 Setengah Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan yang kadang masih luput dari perhatian pemerintah adalah masalah setengah pengangguran. Mereka yang disebut sebagai setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa). Sementara mereka yang termasuk ke dalam pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Pekerja Tidak Penuh	25,82	40,27	31,92
- Setengah Penganggur	33,11	20,23	26,25
- Pekerja Paruh Waktu	66,89	79,77	73,75

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

Dari tabel 5.5 terlihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja paruh waktu (*part time worker*) mencapai 73,75 persen. Dengan kata lain, lebih dari separuh pekerja yang bekerja di bawah jam normal merupakan setengah pengangguran sukarela. Minimnya lapangan pekerjaan dan dorongan untuk memenuhi

kebutuhan hidup membuat mereka akhirnya bekerja dengan status sebagai pekerja paruh waktu (*part time worker*). Hal tersebut otomatis akan berdampak pada minimnya penghasilan yang diterima. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase pekerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu persentasenya cukup tinggi mencapai 79,77 persen.

5.7 Pengangguran Terdidik

Salah satu yang menjadi masalah di bidang ketenagakerjaan dan harus menjadi perhatian adalah adanya pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Pendidikan yang termasuk ke dalam investasi pada bidang sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan. Namun kenyataan yang terjadi, pendidikan tinggi ternyata tidak serta merta dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Mutu pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah lain yang menjadi kendala. Kualitas/mutu pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah. Banyaknya lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang tidak/belum siap pakai dalam memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki menjadi salah satu indikatornya.

Tabel 5.6 Persentase Pengangguran menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
<= SD	16,99	9,91	13,93
SMP	16,40	13,07	14,96
SMA	55,11	58,23	56,46
Diploma I/II/III	1,55	5,15	3,11
Universitas	9,95	13,64	11,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2018)

Dari tabel 5.6 terlihat bahwa persentase pengangguran yang ada di Sumatera Utara dengan jenjang pendidikan SMA keatas tergolong cukup besar. Pada jenjang pendidikan SMA persentase pengangguran sebesar 56,46 persen, pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,11 persen, dan pada jenjang pendidikan universitas ada sebesar 11,55 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang menganggur dengan jenjang pendidikan SMA keatas lebih besar dibanding perempuan. Di satu sisi, merupakan hal yang cukup menggembirakan bahwa sudah banyak penduduk di Sumatera Utara yang masuk ke dalam angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, atau memberikan keterampilan yang lebih bagi mereka agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri sehingga angka pengangguran dapat lebih ditekan.

FERTILITAS DAN KB

Usia perkawinan pertama di Sumatera Utara mayoritas ada di kelompok umur 19-24 tahun yaitu sebesar 56,81 %.

Kelompok umur kedua adalah 25-34 tahun (23,00%)

Dapat dikatakan bahwa program pemerintah mendewasakan usia perkawinan pertama dari seorang wanita telah cukup berhasil.

Rata-rata umur perkawinan pertama di wilayah perkotaan lebih tua dibanding di wilayah perdesaan



BAB 6 FERTILITAS DAN KB

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program SDGs (*Sustainable Development Goals*), Indonesia telah berikrar untuk ikut berupaya dalam usaha menyejahterakan masyarakatnya. Dalam upaya tersebut, Indonesia menetapkan beberapa indikator utama untuk menilai pencapaian tujuan SDGs yang telah disepakati bersama. Di antara banyak indikator yang telah ditetapkan, salah satu indikator utama yang menjadi prioritas adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Salah satu outputnya adalah mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian maternal merupakan masalah kesehatan global yang menjadi indikator penting dalam keberhasilan program kesehatan ibu. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat fertilitas. Secara umum, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup.

Berbicara tentang fertilitas, tentu saja berbicara tentang perempuan karena kemampuan melahirkan anak adalah hak prerogatif perempuan. Hal-hal yang menyangkut tentang fertilitas harusnya menjadi perhatian khusus agar terjadi fertilitas yang sehat dan berkualitas. Salah satunya adalah faktor usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama adalah usia menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Usia perkawinan pertama memiliki hubungan negatif dengan fertilitas. Semakin muda usia perkawinan pertamanya, maka akan semakin panjang masa reproduksinya, atau semakin banyak anak yang akan dilahirkan.

Usia perkawinan pertama seorang perempuan juga sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas. Semakin muda usia perkawinan seorang perempuan maka akan semakin tinggi resiko yang akan dialami pada masa kehamilan dan persalinan. Kondisi rahim yang belum matang menjadi salah satu penyebab resiko pada masa kehamilan di usia yang sangat muda. Begitu juga jika usia perkawinan pertamanya terlalu tua, akan beresiko pada masa kehamilan dan melahirkan dikarenakan lebih rentan mengalami berbagai penyakit yang berhubungan dengan fertilitas. Hal tersebut dapat berdampak pada resiko kematian ibu, cacat janin, keguguran, komplikasi kehamilan, dan lain-lain.

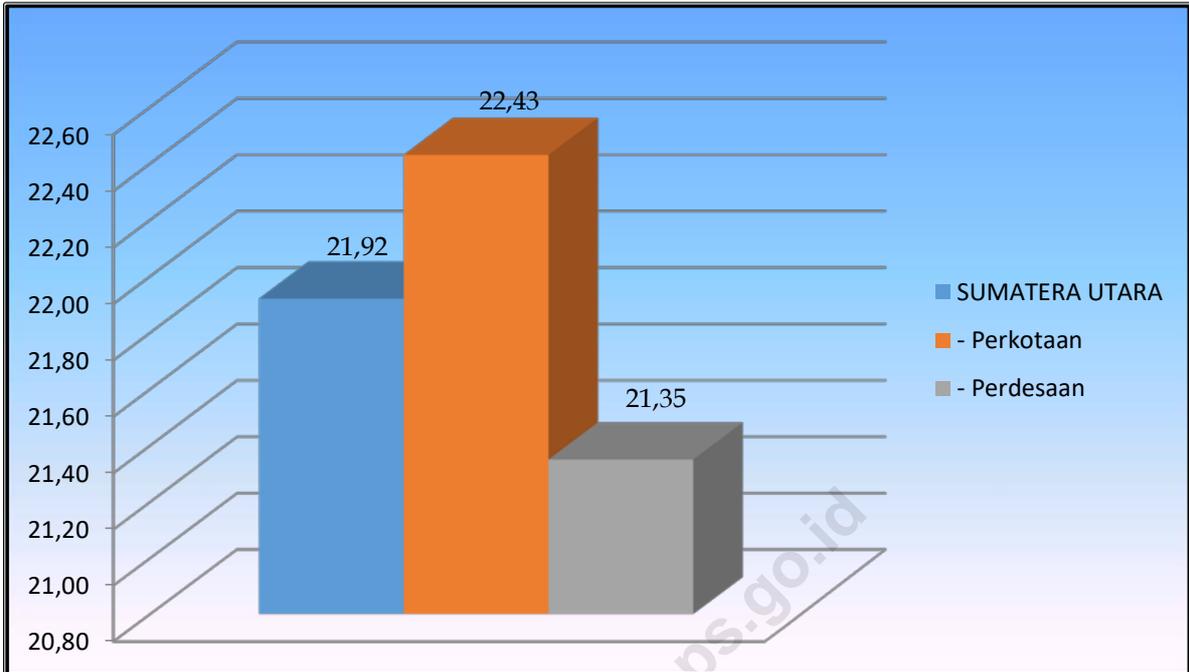
Usia perkawinan pertama yang terlalu tua juga beresiko pasangan tersebut susah mendapatkan keturunan. Resiko yang ditimbulkan dari usia kawin pertama tidak hanya bersifat medik dan menyangkut keselamatan fisik ibu dan anak tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia generasi mendatang yang dihasilkan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pemerintah telah menetapkan batasan usia perkawinan pertama. Pada Bab 2 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Bahkan sekarang telah ada program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Penundaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional, yang dapat memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama.

6.1 Umur Perkawinan Pertama

Berdasarkan Susenas 2018, rata-rata umur perkawinan pertama wanita berumur 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin di Sumatera Utara adalah 21-22 tahun. Dilihat menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, wanita berumur 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin di wilayah perkotaan rata-rata umur perkawinan pertamanya lebih tua dibanding wanita berumur 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin di wilayah perdesaan. Di wilayah perkotaan rata-rata usia perkawinan pertama adalah 22-23 tahun, sementara di wilayah perdesaan adalah 21-22 tahun. Hal ini sudah sejalan dengan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) yang sedang dilaksanakan pemerintah.

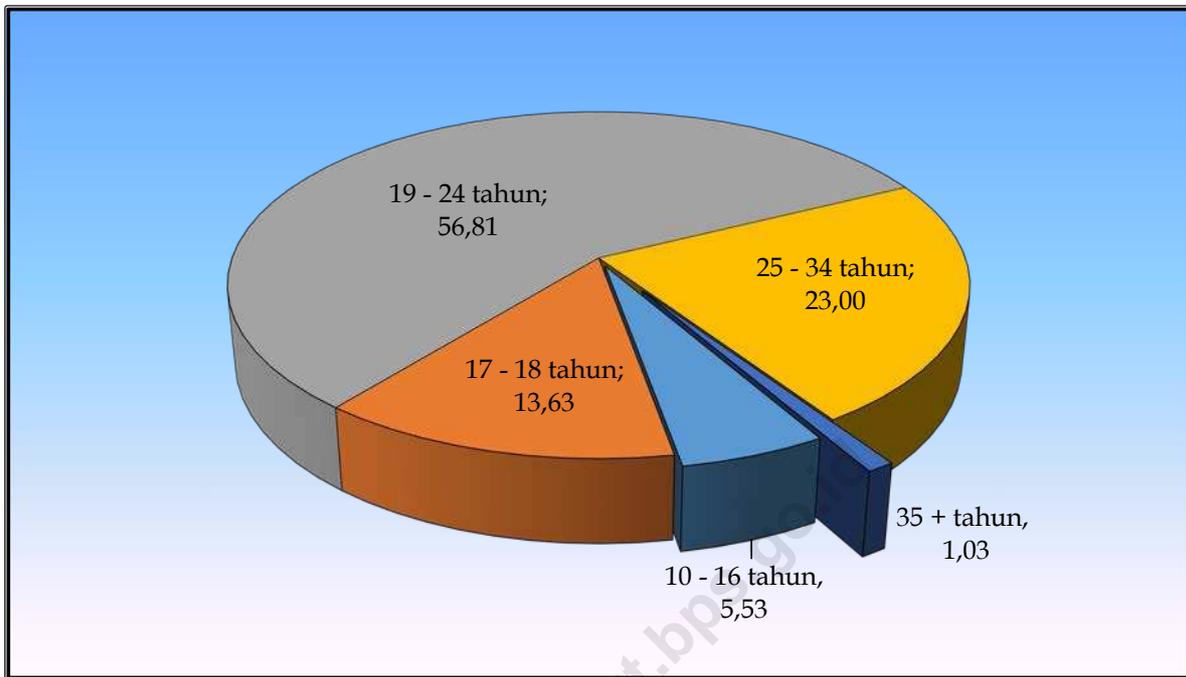
Gambar 6.1 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin menurut Wilayah Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Dilihat lebih rinci menurut kelompok umur, usia perkawinan pertama di Sumatera Utara, persentase terbesar ada di kelompok umur 19–24 tahun yaitu sebesar 56,81 persen. Kelompok umur kedua adalah 25-34 tahun sebesar 23,00 persen. Sementara persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertama di kelompok umur 17–18 tahun di Sumatera Utara ada sebanyak 13,63 persen. Dengan melihat dari kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa program pemerintah mendewasakan usia perkawinan pertama dari seorang wanita telah cukup berhasil. Hal tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat resiko kehamilan dan persalinan pada wanita tersebut, selain juga dapat menurunkan tingkat fertilitas di Sumatera Utara.

Gambar 6.2 Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

6.2 Partisipasi KB

Partisipasi KB diukur dengan besarnya persentase perempuan berstatus kawin usia 15–49 tahun yang sedang menggunakan KB (*current user*) dan yang pernah menggunakan KB (*ever user*). Berdasarkan data Susenas 2018, persentase wanita usia subur (WUS) berumur 15-49 tahun yang masih menggunakan KB ada sebanyak 45,12 persen, dan yang pernah menggunakan KB ada sebanyak 11,54 persen. Angka ini sudah tergolong cukup tinggi dimana lebih dari 50 persen wanita usia subur berumur 15-49 tahun di Sumatera Utara sedang dan pernah menggunakan KB.

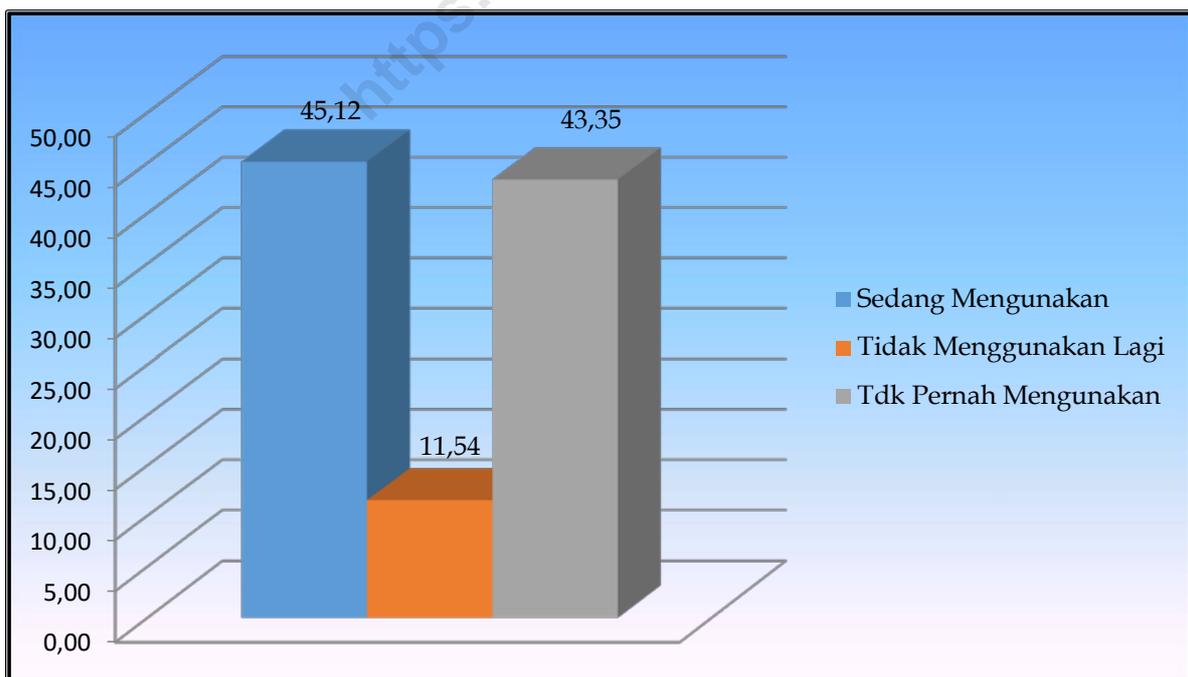
Banyak alasan yang mendasari seseorang tidak lagi menggunakan KB. Diantaranya adalah karena adanya efek samping yang dialami. Efek samping yang terjadi pada beberapa orang bisa berbeda-beda walaupun menggunakan alat KB dengan jenis yang sama. Beberapa efek samping yang terjadi pada penggunaan beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain:

- Kondom: reaksi alergi.

- Oral pil: mual/muntah, pusing kepala, nafsu makan bertambah, lesu lemah tidakbersemangat dalam bekerja, penurunan ASI, tekanan darah tinggi, perubahan berat badan, jerawat, bercak coklat pada wajah (*hyper pigmentasi*), varises, keputihan, gangguan haid.
- Suntik: tidak datang haid, penambahan berat badan, sakit kepala, nyeri pinggul, tekanan darah tinggi.
- Implant: “hilang” tidak teraba, nyeri dada, pendarahan, bercak, nyeri kepala, mual/pusing/gelisah, berat badan bertambah/berkurang.
- AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim): perdarahan, gangguan haid, demam, menggigil, cairan vagina yang banyak.
- Vasektomi: perdarahan sedikit membasahi plester penutup luka, nyeri didaerah luka, gatal di kulit disertai bentol bentol.

Selain efek samping dari penggunaan alat KB, alasan lain seseorang tidak lagi menggunakan KB diantaranya adalah: karena ingin punya anak, sudah menopause, suami jarang di rumah (merantau) atau sudah bercerai.

Gambar 6.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat KB Tahun 2018



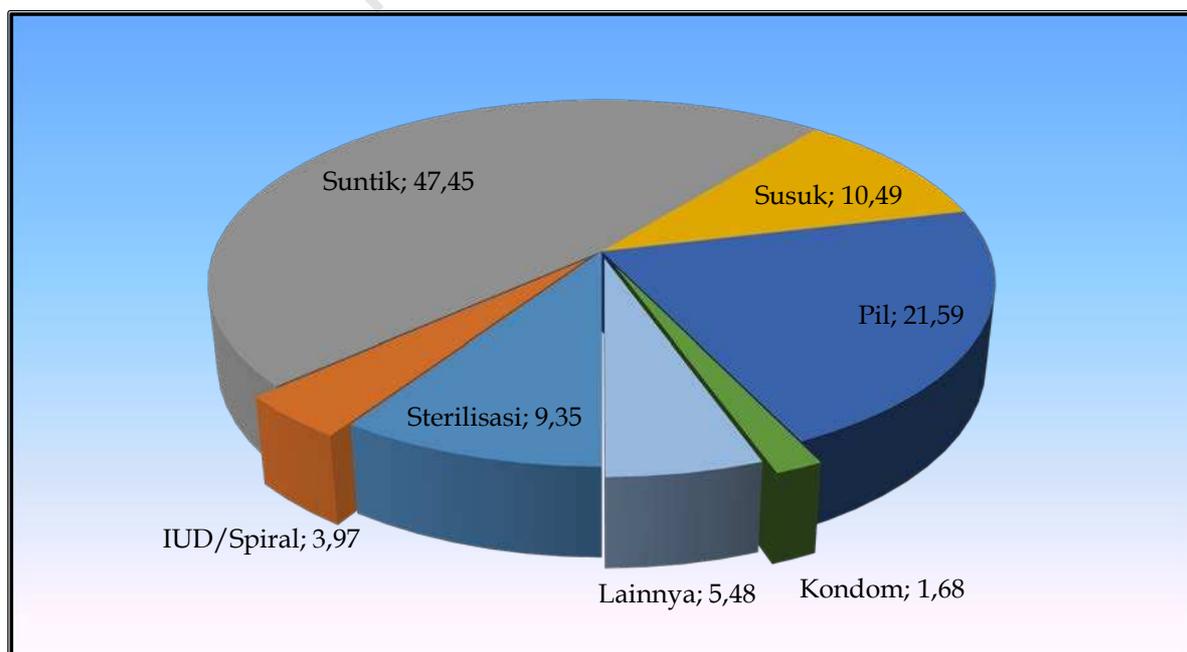
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)

Dilihat menurut alat/cara KB yang sedang digunakan, mayoritas WUS di Sumatera Utara menggunakan alat KB suntik, yaitu sebanyak 41,13 persen. Alat/cara KB kedua yang banyak dipakai oleh WUS di Sumatera Utara adalah pil KB, yaitu sebanyak 17,66 persen, dan susuk sebanyak 10,41 persen. Sementara alat/cara KB selain suntik, pil KB dan susuk, persentasenya kecil yaitu di bawah 10 persen.

Penggunaan alat kontrasepsi yang termasuk jenis tetap (kontrasepsi mantap/kontap) yaitu jenis MOP/MOW (sterilisasi), IUD/AKDR, dan susuk KB masih termasuk kecil. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak peserta KB yang ingin menambah anak sehingga lebih memilih jenis alat kontrasepsi non kontap sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu ingin mempunyai anak lagi.

Penekanan penggunaan alat KB juga masih ditekankan hanya untuk perempuan padahal keberhasilan program Keluarga Berencana sebenarnya juga dituntut akan peran laki-laki sebagai pasangannya. Hal ini terlihat dari kecilnya persentase penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi, yaitu hanya 1,68 persen. Pilihan alat kontrasepsi laki-laki yang digunakan juga masih terbatas, yaitu hanya MOP dan kondom. Di kemudian hari, mungkin perlu ditingkatkan lagi peran serta laki-laki dalam kepesertaan KB.

Gambar 6.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan Tahun 2018

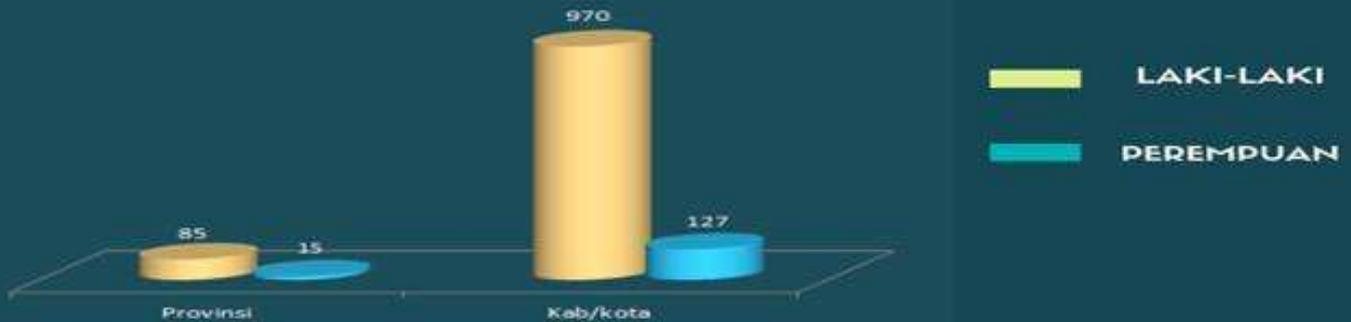


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2018)



PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

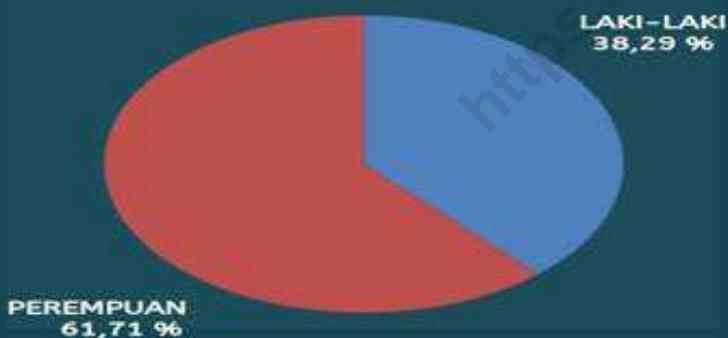
JUMLAH ANGGOTA DPRD SUMATERA UTARA



Jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari golongan perempuan hanya sebanyak 15 orang (15%) dari total 100 orang.

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten/Kota ada sebanyak 1.097 orang dengan 12% diantaranya adalah perempuan.

JUMLAH PNS OTONOM:



Jumlah pegawai perempuan mencapai lebih dari separuh dari total pegawai yang ada.

JUMLAH PNS MENURUT JENJANG PENDIDIKAN



- Jumlah pegawai perempuan mendominasi untuk tingkat pendidikan SMA, Diploma, dan perguruan tinggi dengan persentase yang jauh lebih banyak dibanding pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama.

- Sementara pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah SMP (SD dan SMP/ sederajat) lebih banyak pegawai dengan jenis kelamin laki-laki.

BAB 7 PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Pembahasan mengenai kiprah perempuan di sektor publik bukan merupakan hal yang baru untuk diperbincangkan. Jika pada jaman dulu, ketika perempuan bekerja di ranah publik, seringkali menjadi pembicaraan di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila laki-laki bekerja di ranah domestik, tidak demikian dengan sekarang. Seiring berjalannya waktu, perbedaan jenis kelamin sebagai dasar pembedaan pembagian kerja sudah mulai hilang. Dewasa ini banyak perempuan yang sudah mulai dapat menunjukkan kemampuan dan perannya di sektor publik, terutama di sektor ekonomi. Bahkan kini mereka sudah bisa mensejajarkan kedudukannya dengan para pria. Perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, terlihat pada peran perempuan di jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Terlepas dari persamaan kesempatan yang diberikan perempuan pada masa sekarang, peran seorang perempuan di sektor domestik tetap tidak dapat ditinggalkan. Hal tersebut menimbulkan peran ganda yang harus dilakoni seorang perempuan, yaitu di sektor publik (pekerjaan) dan di sektor domestik (rumah). Dengan status peran ganda tersebut, sedikit banyak menimbulkan dampak terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, yaitu dampak positif dan sekaligus dampak negatif. Dampak positif yang terjadi adalah terbantunya perekonomian rumah tangga, selain juga sebagai pembuktian bagi perempuan itu sendiri bahwa dia mampu menunjukkan eksistensinya di sektor publik. Idealisme seorang perempuan juga dapat tersalurkan dengan menjalani perannya di sektor publik. Sebaliknya, dampak negatif yang mungkin terjadi adalah adanya konflik antara peran pekerjaan dan peran keluarga, tuntutan adanya waktu dan tenaga ekstra, adanya persaingan (yang mungkin tidak diakui) antara suami dan isteri, dan jika keluarga itu mempunyai anak-anak, perhatian terhadap anak menjadi lebih berkurang.

7.1 Politik dan Legislatif

Keanggotaan perempuan dalam anggota dewan yang duduk di lembaga legislatif merupakan salah satu bentuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan haknya. Keberadaan mereka diharapkan dapat menyuarakan aspirasi yang pro terhadap kepentingan perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan. Selain itu mereka dapat berperan dalam bidang pembangunan karena suara mereka dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan dampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, pada kenyataannya, komposisi keanggotaan yang ada masih timpang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan adanya pengambilan keputusan yang bias gender yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam panggung politik Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Sementara dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 pasal 8 diatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat ketentuan tentang kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (dalam hal ini adalah kaum perempuan) untuk memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

**Tabel 7.1 Banyaknya Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Sumatera Utara	85	15	100
Kabupaten			
01 Nias	25	0	25
02 Mandailing Natal	36	3	39
03 Tapanuli Selatan	27	3	30
04 Tapanuli Tengah	33	2	35
05 Tapanuli Utara	32	3	35
06 Toba Samosir	28	2	30
07 Labuhanbatu	31	14	45
08 Asahan	38	7	45
09 Simalungun	44	6	50
10 Dairi	33	2	35
11 Karo	28	7	35
12 Deli Serdang	44	6	50
13 Langkat	46	4	50
14 Nias Selatan	30	5	35
15 Humbang Hasundutan	24	1	25
16 Pakpak Bharat	20	0	20
17 Samosir	21	4	25
18 Serdang Bedagai	37	8	45
19 Batu Bara	29	5	34
20 Padang Lawas Utara	28	2	30
21 Padang Lawas	29	1	30
22 Labuhanbatu Selatan	32	3	35
23 Labuhanbatu Utara	33	1	34
24 Nias Utara	23	2	25
25 Nias Barat	17	3	20
Kota			
71 Sibolga	16	4	20
72 Tanjungbalai	21	4	25
73 Pematangsiantar	23	7	30
74 Tebing Tinggi	23	2	25
75 Medan	45	5	50
76 Binjai	26	4	30
77 Padangsidempuan	26	4	30
78 Gunungsitoli	22	3	25
Jumlah	1 055	142	1 197

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2019

Di Sumatera Utara, jumlah anggota DPRD dari kalangan perempuan masih sangat sedikit dibandingkan laki-laki. Untuk anggota DPRD Provinsi, persentase anggota perempuan hanya sebesar 15,00 persen. Itu artinya hanya ada suara perempuan sebanyak 15 orang yang mewakili di kursi DPRD tingkat provinsi dari 100 orang anggota DPRD tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sisanya sebanyak 85 orang (85%) didominasi oleh anggota laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi perempuan di lembaga legislatif masih sangat kecil dibandingkan dengan kaum laki-laki. Keterwakilan perempuan yang sangat kecil tersebut mengakibatkan sulitnya mengarahkan kebijakan yang disusun untuk dapat responsif gender.

Pada tingkat kabupaten/kota, jumlah anggota legislatif dari kalangan perempuan rata-rata di bawah 20 persen. Hanya 2 kabupaten/kota yang mempunyai persentase keanggotaan perempuan di legislatifnya lebih dari 20 persen, yaitu Kabupaten Labuhanbatu (31,11%) dan Kota Pematangsiantar (23,33%).

Dilihat dari asal daerah pemilihan (dapem), pada tabel 7.2 disajikan data mengenai jumlah anggota DPRD Provinsi menurut jenis kelamin dan daerah pemilihan tahun 2018. Terlihat bahwa daerah pemilihan dengan persentase jumlah perempuan terbanyak yang terpilih untuk duduk di kursi DPRD Provinsi adalah Daerah Pemilihan (Dapem) Sumut X, yaitu daerah pemilihan untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Sebanyak 42,86 persen anggota legislatif perempuan terpilih di daerah pemilihan ini. Jika dilihat secara absolut, sebanyak 3 orang dari total 7 orang perempuan yang terpilih di dapem ini.

Daerah pemilihan kedua dengan persentase jumlah anggota perempuan terbanyak yang terpilih adalah Daerah Pemilihan Sumut VIII yaitu daerah pemilihan untuk wilayah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Sebanyak 2 (dua) orang perempuan (33,33%) terpilih di dapem ini dari total 6 orang anggota DPRD tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan ini. Sementara itu, daerah pemilihan yang tidak ada wakil perempuan untuk duduk sebagai anggota DPRD tingkat provinsi adalah Dapem IV Sumut, yaitu wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Dapem VII Sumut, yaitu wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Manadailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas.

**Tabel 7.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin
Dan Daerah Pemilihan Tahun 2018**

Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Dapem Sumut I: Kec. Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	10	1	11
2. Dapem Sumut II: Kec. Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Baru	5	2	7
3. Dapem Sumut III: Kab. Deli Serdang	12	1	13
4. Dapem Sumut IV: Kab. Sergai, Tebing Tinggi	5	-	5
5. Dapem Sumut V: Kab. Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai	7	3	10
6. Dapem Sumut VI: Labuhanbatu, Labura, Labusel	7	1	8
7. Dapem Sumut VII: Tapsel, P.Sidimpuan, Madina, Paluta, Palas	9	-	9
8. Dapem Sumut VIII: Nias, Nisel, Nisbar, Nisut, Gunungsitoli	4	2	6
9. Dapem Sumut IX: Tobasa, Samosir, Taput, Humbahas, Tapteng, Sibolga	8	2	10
10. Dapem Sumut X: Simalungun, P.Siantar	4	3	7
11. Dapem Sumut XI: Karo, Dairi, Pakpak Bharat	3	1	4
12. Dapem Sumut XII: Langkat, Binjai	9	1	10
Jumlah	83	17	100

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2019

7.2 Pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil

Peranan perempuan selain sebagai politisi di bidang legislatif juga berperan dalam kehidupan masyarakat dalam bidang eksekutif. Peranan perempuan di bidang eksekutif tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk kontribusi kaum perempuan dalam pembangunan. Peran perempuan ini memengaruhi kebijakan pengambilan keputusan yang mendukung kesetaraan gender bila menduduki posisi strategis sebagai penentu kebijakan.

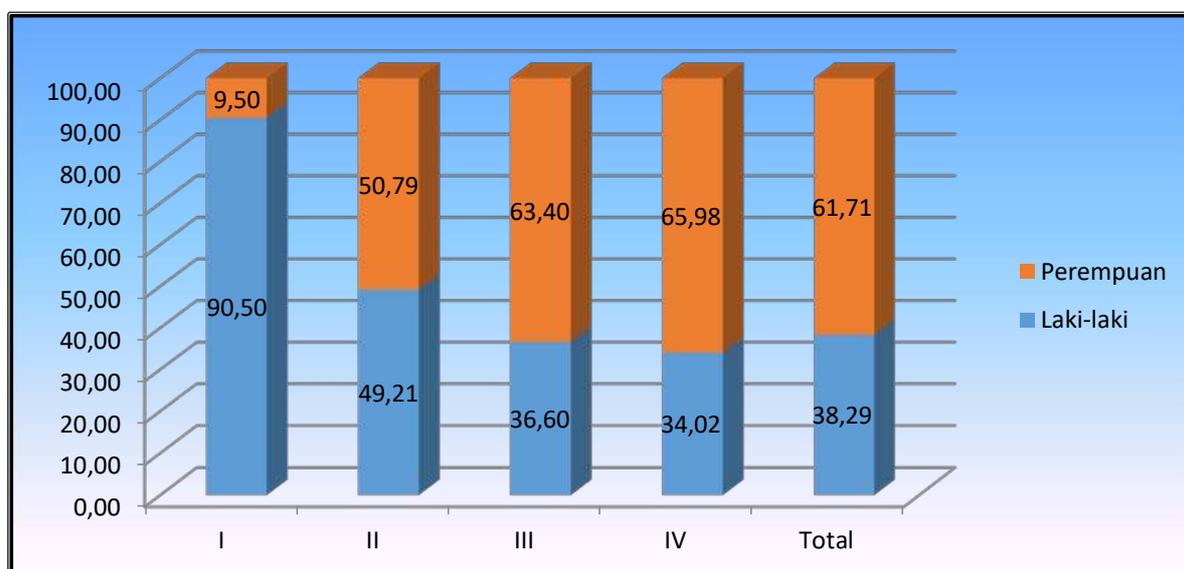
**Tabel 7.3 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Golongan
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Total
I	1 277	134	1 411
II	15 144	15 631	30 775
III	38 258	66 283	104 541
IV	18 588	36 055	54 643
Jumlah	73 267	118 103	191 370

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2019

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah (Otonom) di Provinsi Sumatera Utara menurut data yang ada di Badan Kepegawaian Negara Provinsi Sumatera Utara seperti yang terangkum dalam Sumatera Utara Dalam Angka 2019 ada sebanyak 191.370 orang. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa jumlah pegawai perempuan mencapai lebih dari separuh dari total pegawai yang ada, yaitu sekitar 61,71 persen atau sebanyak 118.103 orang. Sementara sisanya sebesar 38,29 persen atau sebanyak 73.267 orang adalah pegawai laki-laki.

**Gambar 7.1 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018**



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2019

Selanjutnya, dilihat menurut golongan kepangkatan terlihat bahwa pegawai dengan golongan II keatas mayoritas adalah pegawai perempuan. Pada golongan II dan III jumlah pegawai perempuan ada sebanyak 50,79 persen dan 63,40 persen dari total pegawai pada golongan ini. Pada golongan IV jumlah pegawai perempuan ada sebanyak 65,98 persen dari total pegawai pada golongan ini. Sementara golongan II ke bawah, yaitu pada golongan I mayoritas adalah pegawai laki-laki. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta perempuan dalam bidang pemerintahan dapat sejajar bahkan lebih dari kaum laki-laki.

Untuk melihat kualitas dari pegawai negeri sipil yang ada dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata PNS otonom di Sumatera Utara berpendidikan DIV dan Sarjana baik laki-laki maupun perempuan. Pegawai yang berpendidikan Diploma ada sebanyak 17,49 persen, dengan pegawai laki-laki yang berpendidikan ada sebanyak 9,49 persen dan pegawai perempuan yang berpendidikan ini ada sebanyak 22,44 persen. Sementara itu, yang berpendidikan SMP ke bawah ada sebanyak 1,49 persen, dimana 3,47 persen adalah pegawai laki-laki dan sebanyak 0,26 persen adalah pegawai perempuan.

Tabel 7.4 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

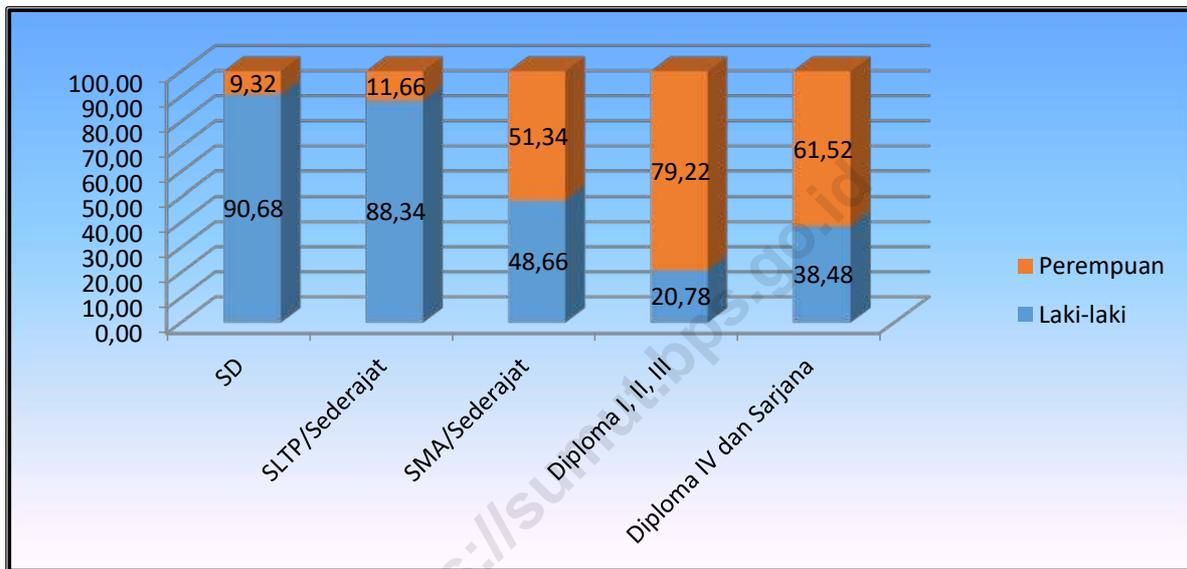
Pendidikan terakhir	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	1,43	0,09	0,61
SLTP/Sederajat	2,04	0,17	0,88
SMA/Sederajat	26,76	17,52	21,06
Diploma I, II, III	9,49	22,44	17,49
Diploma IV dan Sarjana	60,28	59,78	59,97
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2019

Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan untuk setiap jenjang pendidikan, jumlah pegawai perempuan mendominasi untuk tingkat pendidikan SMA, Diploma, dan perguruan tinggi dengan persentase yang jauh lebih banyak dibanding

pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama. Sementara pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah SMP (SD dan SMP/ sederajat) lebih banyak pegawai dengan jenis kelamin laki-laki. Hal tersebut membuktikan bahwa di kalangan perempuan sudah mulai mempertimbangkan pendidikan sebagai modal dasar untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan.

Gambar 7.2 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2019



KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Selama kurun waktu 2014-2018, tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi di Sumatera Utara adalah sebanyak 5.169 kasus

- Perkosaan sebanyak 983 kasus,
- Melanggar kesopanan/perzinahan sebanyak 3.528 kasus,
- Melarikan wanita di bawah umur sebanyak 658 kasus

NAMUN DIDUGA,

MASIH BANYAK KEJADIAN KEJAHATAN TERHADAP

PEREMPUAN YANG BELUM

DILAPORKAN.



BAB 8

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan menjadi satu topik bahasan yang sedang banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat luas, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga akademisi saat ini. Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin.

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan non fisik, maupun tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Beberapa kejadian yang bisa terbilang sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain: pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan tersebut ternyata memicu terhadap terjadinya kekerasan lainnya terhadap perempuan, terutama perdagangan manusia (*human trafficking*). Salah satu kejadian lain yang terjadi di Sumatera Utara yang berkaitan dengan perempuan adalah adanya peristiwa melarikan wanita di bawah umur.

Data banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan didasarkan pada laporan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara yang bersumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2014 sampai dengan 2018 seperti yang

terangkum dalam Sumatera Utara Dalam Angka 2019. Tidak banyak kejadian tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal tersebut berakibat tidak banyak data yang tercatat sehingga menyulitkan bagi pihak-pihak terkait untuk mengusut secara tuntas kasus kekerasan terhadap perempuan. Beberapa data kriminalitas yang berhubungan dengan perempuan yang tercatat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) antara lain: kasus perkosaan, melanggar kesopanan/perzinahan, dan melarikan wanita dibawah umur.

Selama kurun waktu 2014-2018, tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi di Sumatera Utara adalah sebanyak 5.169 kasus, terdiri dari kasus perkosaan sebanyak 983 kasus, melanggar kesopanan/perzinahan sebanyak 3.528 kasus, dan melarikan wanita di bawah umur sebanyak 658 kasus. Jumlah tersebut tergolong cukup tinggi. Namun diduga, masih banyak kejadian kejahatan terhadap perempuan yang belum dilaporkan.

Banyak hal yang melatarbelakangi keputusan para korban kekerasan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum dan budaya untuk menutupi masalah dalam rumah tangga karena dianggap sebagai aib yang tidak boleh diceritakan kepada masyarakat umum. Korban merasa takut akan adanya konsekuensi sosial dari masyarakat terhadap kasus yang terjadi pada dirinya. Pelaku kekerasan bisa siapa saja, dan tidak jarang pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti suami, ayah, paman, sepupu, kakak dan lainnya, serta orang yang dipercaya seperti tetangga, teman, pembantu di rumah, guru, dokter.

Tabel 8.1 Banyaknya Kasus Terhadap Perempuan Tahun 2014 - 2018

Tahun	Perkosaan	Melanggar Kesopanan/Perzinahan	Melarikan Wanita di bawah Umur	Jumlah
2014	245	656	130	1 031
2015	175	808	161	1 144
2016	197	909	140	1 246
2017	155	590	123	868
2018	211	565	104	880
Jumlah	983	3 528	658	5 169

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2019

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sumatera Utara merupakan satu pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mencari solusi atas kasus-kasus yang terjadi. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu yang tidak bisa lagi dianggap sebagai isu terbelakang. Perlu adanya keseriusan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengatasi kasus ini. Tindakan penanganannya harus lebih intensif dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak. Dalam pengelolaannya, perlu lebih dipacu upaya mengatasi akar penyebab, bukan hanya akibat atau gejala dari permasalahan tersebut. Selain itu, perlu payung hukum yang jelas dalam hal perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk peraturan daerah sehingga edukasi masalah gender ini dapat lebih digiatkan.

<https://sumut.bps.go.id>



KESIMPULAN

BAB 9 KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kemampuan wanita merawat anaknya sejak usia dini.
2. Komposisi jumlah penduduk di Sumatera Utara lebih banyak perempuan dibanding laki-laki yang tercermin dari rasio jenis kelamin sebesar 99,60, yang artinya terdapat 99 orang penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.
3. Tingkat pendidikan perempuan di Sumatera Utara sudah mampu menyamai tingkat pendidikan laki-laki. Bahkan jumlah perempuan yang menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi persentasenya lebih besar dibanding laki-laki.
4. Peran serta perempuan dalam ekonomi masih minim. Persentase pengangguran di kalangan perempuan masih lebih besar dibanding laki-laki. Status perempuan di bidang ketenagakerjaan mayoritas adalah pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Masih sedikit perempuan yang berstatus sebagai pengusaha.
5. Keterlibatan perempuan di bidang politik juga masih sangat kecil, jumlahnya masih jauh dibanding jumlah laki-laki yang terlibat di bidang politik. UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU nomor 8 Tahun 2012 belum dapat memaksimalkan jumlah perempuan dalam kursi legislatif.
6. Kekerasan terhadap perempuan harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah provinsi Sumatera Utara karena tingginya jumlah kasus yang dilakukan terhadap perempuan di Sumatera Utara.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp. : (061) 8452343, Fax. : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

ISSN 2656-2243



9 772656 224000 >